

RENSTRA
BALAI BESAR VETERINER WATES YOGYAKARTA
TAHUN 2015 - 2019



BALAI BESAR VETERINER WATES YOGYAKARTA
JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

KATA PENGANTAR

Perencanaan strategis (Renstra) Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta merupakan hasil pembahasan dari seluruh staf yang bertanggung jawab dan masukan dari narasumber serta *stakeholders* yang peduli terhadap pembangunan peternakan dan kesehatan hewan terutama kegiatan Balai Besar Veteriner Wates dalam rangka mengantisipasi era reformasi terutama yang menyangkut tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Renstra akan memberikan arah bagi seluruh aparat Balai Besar Veteriner Wates dalam menuju masa depan yang lebih jelas, di samping itu renstra merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi.

Renstra Tahun 2015-2019 ini berlandaskan pada Rencana Strategis dan Program Kerja Pembangunan Produksi Peternakan Tahun 2010-2014, Kebijakan Teknis Kesehatan Hewan Nasional, dan Kebijakan Teknis Masyarakat Veteriner, serta mengacu pada Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan yang telah ditetapkan Bersama. Dengan adanya visi, misi dan strategi. Untuk dapat menyelaraskan dengan Renstra 2015-2019 Kementerian Pertanian dan Ditjen PKH telah dilakukan revisi Renstra BBVet Wates. Seiring berjalannya waktu Ditjen PKH telah melakukan revisi ke II, selanjutnya BBVet Wates menyelaraskan agar sesuai dengan revisi Renstra Ditjen PKH.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga terwujudnya dokumen Rencana Strategis Balai Besar Veteriner Wates, Yogyakarta.

Kami menyadari bahwa Renstra ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan dapat memberikan gambaran kebijakan dan rencana program bagi instansi terkait yang membutuhkan.

Yogyakarta, 26 September 2019
Kepala Balai Besar Veteriner Wates,



Drh. Bagoes Poermadjaja, M. Sc.
NIP 196308201990031003

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|-----------|
| Pengertian | 3 |
| I. PENDAHULUAN..... | 8 |
| I.1. Latar Belakang | 8 |
| I.2. Justifikasi | 9 |
| I.3. Maksud dan Tujuan..... | 12 |
| II. POTENSI DAN PERMASALAHAN | 13 |
| 2.1. Potensi | 13 |
| 2.2. Permasalahan | 17 |
| III. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN..... | 22 |
| 3.1. Visi | 24 |
| 3.2. Misi..... | 24 |
| 3.3. Tujuan | 24 |
| 3.4. Sasaran..... | 25 |
| IV. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI | 28 |
| 4.1. Paradigma pelayanan veteriner | 28 |
| 4.2. Identifikasi Faktor-Faktor Internal dan Eksternal | 28 |
| 4.3. Strategi..... | 29 |
| 4.4. Kebijakan Operasional..... | 30 |
| V. PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN..... | 33 |
| 5.1. Pengamatan dan Pengidentifikasian Diagnosa..... | 38 |
| 5.2. Pengujian Veteriner dan Produk Hewan | 38 |
| 5.3. Pengembangan Teknik dan Metoda | 39 |
| 5.4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat | 39 |
| VI. ARSITEKTUR DAN INFORMASI KINERJA..... | 39 |
| VII.CATATAN EVALUASI DAN PERISTIWA PENTING BBVET WATES KURUN WAKTU 2010-2014..... | 46 |
| VIII. KEBUTUHAN SUMBER DAYA DAN DANA | 48 |
| 8.1. Kebutuhan SDM..... | 48 |
| 8.2. Kebutuhan Dana dan Anggaran | 50 |
| 8.3. Kebutuhan Sarana Prasarana | 50 |
| 8.4. Kebutuhan Tenaga Pendukung | 53 |
| IX.PENUTUP | 54 |

Pengertian

1. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, budi daya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
2. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) adalah dokumen perencanaan Kementerian/ Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
5. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
6. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
7. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan, produk hewan, dan penyakit hewan.
8. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
9. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
10. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan dan manusia, serta Hewan dan media pembawa penyakit Hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, Pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
11. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah penyakit Hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada Hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan / atau bersifat zoonotik.
12. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
13. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang

berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia.

14. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
15. Teknologi kesehatan hewan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengembangan dan penerapan ilmu, tehnik, rekayasa, dan industri di bidang kesehatan hewan.
16. Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disebut Sikeswanas adalah tatanan Kesehatan Hewan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diselenggarakan oleh Otoritas Veteriner dengan melibatkan seluruh penyelenggara Kesehatan Hewan, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara terpadu.
17. Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan adalah tindakan untuk memantau ada tidaknya suatu penyakit hewan tertentu disuatu pulau atau kawasan pengamanan hayati hewan sebagai langkah awal dalam rangka kewaspadaan dini.
18. Pencegahan penyakit hewan adalah tindakan karantina yang dilakukan dalam rangka mencegah masuknya penyakit hewan dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.
19. Pengamanan penyakit hewan adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya perlindungan hewan dan lingkungannya dari penyakit hewan.
20. Pemberantasan penyakit hewan adalah tindakan untuk membebaskan suatu wilayah dan/atau kawasan pengamanan hayati dan/atau pulau dari penyakit hewan menular yang meliputi usaha penutupan daerah tertentu terhadap keluar-masuk dan lalu- lintas hewan dan produk hewan, penanganan hewan tertular dan bangkai, serta tindakan penanganan wabah yang meliputi eradikasi penyakit hewan dan depopulasi hewan.
21. Pengobatan penyakit hewan adalah tindakan untuk menghilangkan rasa sakit, penyebab sakit, mengoptimalkan kebugaran dan ketahanan hewan melalui usaha perbaikan gizi, tindakan transaksi terapetik, penyediaan dan pemakaian obat hewan, penyediaan sarana dan prasarana, pengawaan dan pemerisaan, serta pemantauan dan evaluasi pasca pengobatan.
22. Kebijakan kesehatan hewan nasional adalah berbagai keputusan otoritas veteriner dan prinsip tindakan yang berbasis pada keragaman jenis hewan dan lingkungan ekosistem dala rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
23. Penyidikan adalah kegiatan untuk menelusuri asal, sumber, dan penyebab penyakit hewan dalam kaitanya dengan hubungan antara induk semang dan lingkungan.
24. Monitoring penyakit adalah kegiatan pemantauan dan analisis data yang ditujukan untuk menilai status kesehatan atau penyakit hewan dalam suatu populasi hewan, berkaitan dengan diterapkannya suatu

- kebijakan pembangunan kesehatan hewan nasional.
25. Penyakit eksotik adalah penyakit yang belum pernah ada di wilayah atau daerah tersebut.
 26. *Biosecurity* adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit ke induk semang dan/atau untuk menjaga agen penyakit yang disimpan dan di isolasi dalam suatu laboratorium tidak mengkontaminasi atau tidak di salahgunakan, misalnya, untuk tujuan bioterrorisme.
 27. *Biosafety* adalah kondisi dan upaya untuk melindungi personal atau operator serta lingkungan laboratorium dan sekitarnya dari agen penyakit hewan dengan cara menyusun protokol khusus, menggunakan peralatan pendukung, dan menyusun desain fasilitas pendukung.
 28. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban.
 29. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.
 30. Instansi Pemerintah sebutan kolektif/ bagi satuan kerja/ satuan organisasi, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan instansi pemerintah lainnya baik pusat maupun daerah.
 31. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
 32. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrument pertanggungjawaban yang pada pokoknya terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi.
 33. Perencanaan Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, termasuk kekuatan dan peluang, dan permasalahan, termasuk kelemahan dan ancaman, yang ada atau mungkin timbul.
 34. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
 35. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
 36. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
 37. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.

38. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan.
39. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
40. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
41. Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perUndang-undangan lainnya.
42. Kebijaksanaan adalah merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.
43. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan. Kegiatan dilakukan juga oleh masyarakat sebagai respon terhadap kebijaksanaan/ program yang dikembangkan instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.
44. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*).
45. Indikator Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, dapat berupa dana, SDM, informasi, kebijaksanaan/ peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.
46. Indikator Keluaran (*outputs*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari sesuatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan / atau non fisik.
47. Indikator Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
48. Indikator Manfaat (*benefits*), adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
49. Indikator Dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negative pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.
50. Zona dalam suatu negara adalah bagian dari suatu negara yang

mempunyai batas alam, status kesehatan populasi hewan, status epidemiologik penyakit hewan menular dan efektivitas daya kendali pelaksanaan otoritas veteriner yang jelas.

51. Kompartemen adalah suatu peternakan dan lingkungannya yang terdiri dari satu kelompok hewan/ ternak atau lebih yang memiliki status kesehatan hewan.
52. Kompartementalisasi (Penataan Kompartemen) adalah serangkaian kegiatan untuk mengkondisikan suatu usaha peternakan agar memiliki status kesehatan hewan melalui penerapan *biosecurity* cara pembibitan ternak yang baik dan cara budidaya ternak yang baik.
53. Analisa risiko adalah proses pengambilan keputusan teknis kesehatan hewan yang didasarkan pada kaidah ilmiah dan kaidah keterbukaan publik melalui serangkaian tahapan kegiatan, meliputi, identifikasi bahaya, penilaian risiko, manajemen risiko dan komunikasi (sosialisasi) risiko.
54. Kesehatan semesta adalah status kesehatan yang meliputi kesehatan hewan, kesehatan manusia dan kesehatan lingkungan.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Balai Besar Veteriner Wates yang selanjutnya disebut BBVet Wates merupakan unit pelaksana teknis pada subsektor peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, perbibitan dan produksi ternak dan keamanan pakan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan secara teknis dibina oleh Direktur Kesehatan Hewan dan Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen.

Dari waktu ke waktu BBVet Wates terus mengalami perkembangan fisik, institusi, target hewan, serta kontribusinya dalam pembangunan subsektor peternakan dan kesehatan hewan. Secara fisik BBVet Wates terletak di Kabupaten Kulon Progo, Wates dan menempati areal lahan seluas 107.212 m² dengan unit bangunan sejumlah 53 unit, jalan dan jembatan 2.340 m².

Secara institusional cakupan wilayah pelayanan BBVet Wates awalnya merupakan Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional IV Yogyakarta dengan wilayah kerja meliputi 6 provinsi di Jawa, yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Jogjakarta dan Jawa Timur (SK Menteri Pertanian Nomor: 315/Kpts/Org/V/1978 tanggal 25 Mei 1978). Setelah terbit SK Menteri Pertanian Nomor 629/Kpts/ OT.140/12/2003 tanggal 20 Desember 2003 wilayah kerja difokuskan pada 3 provinsi, yakni Jawa Tengah, Daerah Istimewa Jogjakarta dan Jawa Timur.

Target surveillans penyakit hewan BBVet Wates diprioritaskan hewan ternak, seperti sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba, unggas, yang secara keseluruhan merupakan 50% dari populasi nasional. Tingginya mobilitas, peredaran dan perdagangan dalam bentuk hewan maupun produk hewan merupakan tanggungjawab bagi BBVet Wates untuk mengembangkan system penjaminan keamanan, kesehatan, maupun kualitas dengan sebaik-baiknya.

Kontribusi BBVet Wates dalam pembangunan subsektor peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, perbibitan dan produksi ternak dan keamanan pakan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Hal ini dapat dipelajari melalui *roadmap* maupun realisasi program kerja dan kegiatan. Untuk tahap selanjutnya berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, BBVet perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, 2015-2035 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan kurun waktu 5 (lima) tahun, 2015-2019. Rencana ini juga merupakan bagian integral RPJP dan RPJM Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Untuk tujuan tersebut, berikut ini disajikan RPJM BBVet Wates yang selanjutnya juga disebut Rencana Strategis (Renstra) BBVet Wates. Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program, dan Kegiatan. Dalam Renstra BBVet Wates juga memuat Rencana Kerja (Renja) yang bersifat kegiatan tahunan, untuk kurun waktu 2015-2019, secara berturut-turut.

1.2. Justifikasi

a. Tugas dan Fungsi

BBVet Wates merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. BBVet Wates dipimpin oleh seorang Kepala Balai Besar, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas

Sesuai dengan Permentan nomor 54/Permentan/OT.140/5/2013, tanggal 25 Mei 2013 BBVet Wates mempunyai tugas melaksanakan pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan, serta pengembangan teknik dan metode penyidikan, diagnosa, dan pengujian veteriner. Untuk menjalankan tugas tersebut memerlukan partisipasi dan dukungan masyarakat agar pelayanan dapat didukung oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, sehingga upaya pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, BBVet Wates menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan;
- b) Pelaksanaan penyidikan penyakit hewan;
- c) Pelaksanaan penyidikan melalui pemeriksaan dan pengujian produk hewan;
- d) Pelaksanaan surveilans penyakit hewan, dan produk hewan;
- e) Pemeriksaan kesehatan hewan, semen, embrio, dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan;
- f) Pembuatan peta penyakit hewan regional;
- g) Pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan diagnosa penyakit hewan menular;
- h) Pelaksanaan pengujian dan pemberian laporan dan/atau sertifikasi hasil uji;
- i) Pelaksanaan pengujian forensik veteriner;
- j) Pelaksanaan peningkatan kesadaran masyarakat (*public awareness*);
- k) Pelaksanaan kajian terbatas teknis veteriner;
- l) Pelaksanaan pengujian toksikologi veteriner dan keamanan pangan;
- m) Pemberian bimbingan teknis laboratorium veteriner, pusat kesehatan hewan, dan kesejahteraan hewan;
- n) Pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian veteriner, serta bimbingan teknis penanggulangan penyakit hewan;

- o) Pelaksanaan analisa risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan di regional;
- p) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- q) Pengkajian batas maksimum residu obat hewan dan cemaran mikroba;
- r) Pemberian pelayanan teknis penyidikan, pengujian veteriner dan produk hewan, serta pengembangan teknik dan metoda penyidikan, diagnosa dan pengujian veteriner;
- s) Pelaksanaan pengembangan dan diseminasi teknik dan metoda penyidikan, diagnosa dan pengujian veteriner;
- t) Pengembangan sistem dan diseminasi informasi veteriner;
- u) Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan;
- v) Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBVet.

b. Kapabilitas berbasis fungsi

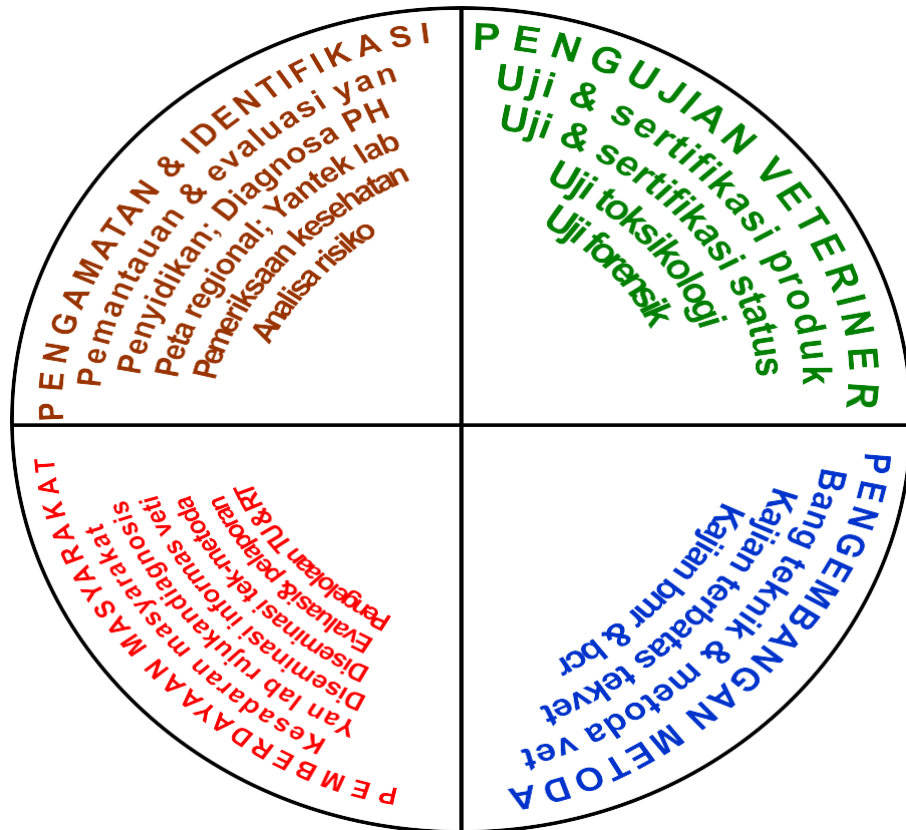
Kapabilitas BBVet Wates berbasis fungsi dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu:

- a) **Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan, meliputi:**
 - (a) Penyidikan penyakit hewan;
 - (b) Penyidikan melalui pemeriksaan dan pengujian produk hewan;
 - (c) Surveilans penyakit hewan, dan produk hewan;
 - (d) Pemeriksaan kesehatan hewan, semen, embrio, dan pendiagnosaan penyakit hewan;
 - (e) Pembuatan peta penyakit hewan regional;
 - (f) Pelaksanaan analisa risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan di regional;
 - (g) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- b) **Pengujian Veteriner dan Produk Hewan**
 - (a) Pelaksanaan pengujian dan pemberian laporan dan/atau sertifikasi hasil uji;
 - (b) Pelaksanaan pengujian forensik veteriner;
 - (c) Pelaksanaan pengujian toksikologi veteriner dan keamanan pangan;
 - (d) Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan;
- c) **Pengembangan Teknik dan Metoda**
 - (a) Pelaksanaan kajian terbatas teknis veteriner;
 - (b) Pengkajian batas maksimum residu obat hewan dan cemaran mikroba;
 - (c) Pemberian pelayanan teknis penyidikan, pengujian veteriner dan produk hewan, serta pengembangan teknik dan metoda penyidikan, diagnosa dan pengujian veteriner;
 - (d) Pelaksanaan pengembangan dan diseminasi teknik dan metoda penyidikan, diagnosa dan pengujian veteriner;

d) **Peningkatan Partisipasi Masyarakat**

- (a) Penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan;
- (b) Pelaksanaan peningkatan kesadaran masyarakat (*public awareness*);
- (c) Pemberian bimbingan teknis laboratorium veteriner, pusat kesehatan hewan, dan kesejahteraan hewan;
- (d) Pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan diagnosa penyakit hewan menular;
- (e) Pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian veteriner, serta bimbingan teknis penanggulangan penyakit hewan;
- (f) Pengembangan sistem dan diseminasi informasi veteriner;
- (g) Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBVet.

GAMBAR/SKEMA TUGAS DAN FUNGSI



1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra BBVet Wates dimaksudkan sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik global, regional maupun domestik dan sektoral, serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk perbaikan kinerja lembaga.

Tujuan Renstra BBVet Wates adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai acuan dalam merencanakan berbagai kebijakan dan strategi BBVet Wates, percepatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan ke arah yang lebih baik dalam kondisi perubahan lingkungan yang cepat, transparan dan semakin kompleks;
- b. Sebagai dokumen yang akan menjadi dasar atau acuan, khususnya bagi BBVet Wates dan berbagai komponen yang menjalankan fungsi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- c. Untuk memberikan gambaran perlunya komitmen dan konsistensi terhadap tugas dan fungsi BBVet Wates, untuk semua pihak pada aktivitas dan kegiatan BBVet Wates di masa mendatang;
- d. Sebagai dasar untuk mengukur capaian kinerja dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi sesuai dengan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) 2016-2019;
- e. Sebagai pedoman umum dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat; dan
- f. Untuk memfasilitasi komunikasi, baik vertikal maupun horizontal, antar dan lintas sektor serta dengan masyarakat peternakan, dan pelaku agribisnis berbasis peternakan dan kesehatan hewan.

II. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. POTENSI

Potensi merupakan hal terkait dengan kemampuan, kekuatan, kesanggupan, atau daya yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Potensi dalam hal ini meliputi kekuatan (*strenght*), yang bersifat internal, dan peluang (*opportunity*), yang bersifat eksternal. Potensi yang dimiliki oleh BBVet Wates berasal dari adanya lahan, bangunan, sumber daya manusia, peralatan laboratorium, teknologi dan bioteknologi kesehatan hewan (veteriner). Potensi ini berkembang sesuai dengan kemajuan kebijakan dan teknologi sehingga potensi tersebut dapat dijadikan referensi contoh laboratorium veteriner di Indonesia.

Potensi akan berkembang menjadikan BBVet Wates sebagai laboratorium veteriner rujukan dikawasan ASEAN (khusus penyakit Avian Influenza), yang terbukti dari kegiatan-kegiatan yang merupakan ruang lingkup terakreditasi sesuai dengan ISO 17025 sehingga diakui baik secara regional ASEAN, maupun Internasional atau global, khususnya untuk pengujian dan penyidikan AI (*Avian Influenza*), salmonella, antrax dan BSE (*Bovine Spongiform Encephalopathy*).

Potensi lain yaitu kepadatan populasi ternak dan hewan lainnya serta jumlah produksi produk hewan termasuk barang (*goods*) dan jasa (*services*), di wilayah pelayanan BBVet Wates yang mencapai kurang lebih 50% dari total populasi secara nasional. Demikian juga perdagangan, mobilitas, dan peredaran ternak, hewan, produk hewan dan obat hewan, yang memerlukan pengawasan dan penjaminan baik keamanan, kesehatan maupun kualitasnya, serta kesejahteraan hewan.

Potensi yang ada sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan strategis eksternal baik ditingkat global dan regional maupun lingkungan strategis internal berupa kebijakan pada subsektor peternakan dan kesehatan hewan, termasuk kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, Perbibitan, produksi ternak, dan keamanan pakan.

a. Lingkungan Strategis Eksternal (Global, Regional)

a) *Sanitary and Phytosanitary* dan *Technical Barrier to Trade*

Perubahan lingkungan strategis global (terkait pelaksanaan aturan WTO (*World Trade Organization*) dan regional (terkait pelaksanaan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) yang sangat berpengaruh dan menjadi peluang terhadap penjaminan kesehatan hewan dan keamanan produk hewan yang diimplementasikan dalam perdagangan baik barang (*goods*) maupun jasa (*services*), terkait peternakan dan kesehatan hewan antar negara seperti harmonisasi sistem dan standar kesehatan hewan dalam perdagangan hewan dan produknya, penyesuaian kebijakan *Sanitary and Phytosanitary (SPS)*, *Technical Barrier to Trade (TBT)* dan analisa risiko penyakit hewan.

Pelaksanaan mendapatkan prioritas mengingat banyaknya hubungan perdagangan langsung luar negeri ke wilayah pelayanan BBVet, demikian juga hubungan langsung kunjungan wisatawan dari luar negeri.

Penerapan SPS dan TBT memberikan peluang dalam perdagangan dunia diantaranya status Indonesia yang dinyatakan bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Sapi gila (BSE atau *Bovine Spongiform Encephalopathy*) yang dapat dijadikan modal dasar ekspor hewan dan produknya ke negara lain khususnya hewan besar. Hal ini tentunya dapat dijadikan motivator bagi pengembangan peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia.

b) Kesehatan Semesta

Disamping itu perubahan paradigma pendekatan dalam pelayanan kesehatan hewan dari *animal disease* (penyakit hewan) menjadi *animal health* (kesehatan hewan) yang diimplementasikan pada kesehatan hewan dalam kelompok (*herd health*) atau dalam populasi (*disease management in population*). Sehingga kesehatan hewan sangat berperan dalam pembangunan peternakan untuk masyarakat luas (*public goods*) termasuk menjamin kesehatan masyarakat dari ancaman penyakit zoonosa (*Rabies, Anthrax, Avian Influenza, Ebola* dan lain-lain), dan kesehatan lingkungan.

Penerapan prinsip-prinsip pendekatan Kesehatan Semesta (*One Health*) oleh dua institusi strategis yaitu Kementerian Pertanian cq Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Republik Indonesia, termasuk kerjasama internal dengan Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis, dengan institusi *International Veterinary Public Health* dan *OIE* (Lembaga Kesehatan Hewan Dunia) merupakan suatu potensi peluang atau keniscayaan dalam mengamankan dunia khususnya Indonesia.

Ancaman penyakit hewan zoonosis seperti *Anthrax, Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE), Avian Influenza, Rabies* dan lain-lain, sangat mungkin mejadi sarana untuk kegiatan yang mengancam pertahanan dan ketahanan nasional yang disebut sebagai bio-terorisme, meskipun belum pernah terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, potensi kewaspadaan nasional harus terus dikembangkan dengan meningkatkan kemampuan bangsa Indonesia dalam hal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dibidang peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner, serta kesejahteraan hewan, misalnya melalui peningkatan kegiatan *research and development* pada subsektor peternakan dan kesehatan hewan, termasuk kesehatan masyarakat veteriner serta kesejahteraan hewan, dengan meningkatkan kualitas laboratorium kesehatan hewan, misalnya dengan peningkatan laboratorium modern seperti *Bio Safety Level-3 (BSL-3)* dan lain-lain.

Adanya strategi (kebijakan program dan kegiatan) berkaitan dengan implementasi *One Health* atau Kesehatan Semesta berupa terwujudnya kesamaan persepsi dan komitmen bersama dalam peningkatan koordinasi

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun antara lembaga sektoral, regional serta global guna melaksanakan konsepsi Kesehatan Semesta tersebut melalui koordinasi pembenahan regulasi veteriner, koordinasi penguatan kelembagaan kesehatan masyarakat veteriner, koordinasi perumusan kebijakan dan program, koordinasi implementasi dan evaluasi program, koordinasi penganggaran, dan kerjasama global. Kebijakan umum ini selanjutnya menjadi arah dan penuntun dalam merumuskan berbagai strategi dan upaya penanggulangan penyakit hewan zoonosis (sesuai 12 prinsip Manhattan).

c) Kedaulatan Pangan

Disamping itu, fungsi kesehatan hewan sangat penting perannya dalam keamanan pangan, sesuai amanat Undang Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dimana **Keamanan Pangan** merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Keamanan Pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kedaulatan pangan. Konsep **kedaulatan pangan** (*food sovereignty*) lebih mengutamakan bagaimana pangan ditentukan oleh komunitas secara mandiri, berdaulat dan berkelanjutan. Kedaulatan Pangan merupakan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Sehingga masyarakat mempunyai hak atas pangan yang aman, cukup gizi dan sesuai dengan kondisi budaya setempat dan hak atas sumber-sumber daya untuk memproduksi pangan serta kemampuan untuk menjaga keberlanjutan hidup mereka dan masyarakatnya, tanpa ketergantungan terhadap Negara lain.

b. Lingkungan Strategis Internal (Sektoral)

a) Peraturan Perundangan terkait Otoritas Veteriner

Perubahan dan tantangan strategis yang terjadi dan bersifat nasional merupakan tuntutan tentang perlunya reformasi di segala bidang, peranan masyarakat madani, dan pengakuan akan pentingnya peranan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan nasional. Dalam perkembangan reformasi di segala bidang, maka diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Landasan-landasan hukum tersebut kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang sejauh ini telah diubah untuk kesekian kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Salah satu penentu keberhasilan pembangunan dalam era otonomi daerah dalam subsektor peternakan dan kesehatan hewan adalah mutlak diperlukan otoritas veteriner nasional yang mampu menembus kisi-kisi otonomi daerah serta mampu membangkitkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. Otoritas veteriner juga memerlukan pembentukan jejaring kerja (*networking*) yang merupakan suatu kemampuan pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian penyakit hewan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan BAB: V Kesehatan Hewan, antara lain Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan dalam bentuk pengamatan dan pengidentifikasian, pencegahan, pengamanan, pemberantasan, dan/atau pengobatan. Urusan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

Demikian juga pada BAB: VI Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, antara lain pada Pasal 56: Kesehatan masyarakat veteriner merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dalam bentuk: a. pengendalian dan penanggulangan zoonosis; b. penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan; c. penjaminan higiene dan sanitasi; d. pengembangan kedokteran perbandingan; dan penanganan bencana.

Disamping itu, juga sesuai amanat Pasal 68A, 68B, 68C, 68D, dan 68E, UU No 41/2014 hal-hal ini memerlukan kesinergian antara PERPU No 2/2014 dan UU No 41/2014 serta UU No 18/2012.

b) Peran Strategis Lembaga Pengujian dan Penyidikan Veteriner

Dalam rangka mengefektifkan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dimaksud pada pasal 39 ayat (1) Undang-undang No.41 Tahun 2014 menyebutkan bahwa, melalui berbagai pendekatan dalam urusan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah mengembangkan kebijakan kesehatan hewan nasional untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan penyelenggaraan kesehatan hewan diberbagai lingkungan ekosistem.

Pada pasal 40 ayat (1), (2), (3) dan (4) ditegaskan bahwa pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan surveilans dan pemetaan, penyidikan dan peringatan dini, pemeriksaan, pengujian, dan diagnosa serta pelaporan. Dalam hal ini Menteri menetapkan jenis penyakit

hewan, peta dan status situasi penyakit hewan, serta penyakit eksotik yang mengancam kesehatan hewan, manusia dan lingkungan berdasarkan hasil pengamatan dan pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas. Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan dilakukan oleh laboratorium veteriner yang diakreditasi atau Menteri menetapkan laboratorium untuk melakukan pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan. Lebih rinci mengenai pengaturan pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan tersebut di atas telah pula dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan.

c) Revitalisasi Pertanian dan Revolusi Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pembangunan sektor pertanian termasuk sub sektor peternakan dalam perkembangannya telah mengalami proses revitalisasi peternakan dan terjadi restrukturisasi kesehatan hewan nasional. Sub sektor peternakan menurut Delgado (1989) akan mengalami revolusi peternakan (*livestock revolution*) sampai tahun 2020. Pada revolusi tersebut produksi pangan daging, telur, dan susu di negara berkembang termasuk Indonesia mengalami peningkatan, tetapi konsumsinya meningkat lebih tinggi lagi.

Sedangkan di negara maju produksi meningkat tajam tetapi konsumsinya mulai memasuki *leveling of* sehingga terjadi ketimpangan konsumsi dan produksi diantara negara berkembang dan negara maju.

Dalam hal ini maka arah kebijakan BBVet Wates harus dapat mengimbangi dengan hasil pengujian yang sesuai dengan tuntutan konsumen. Oleh karena itu Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan berisikan Direktorat Jenderal yang profesional dalam mewujudkan kemandirian dan keamanan pangan asal ternak.

Khusus untuk kesehatan hewan mengandung pengertian mengenai arti pentingnya kesehatan hewan dalam arti luas termasuk kesehatan masyarakat veteriner dan pasca panen. Restrukturisasi peternakan dan kesehatan hewan dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan peternakan dan kelembagaan kesehatan hewan nasional serta adanya otoritas veteriner yang mampu menjawab tantangan dan dinamika perubahan paradigma pembangunan pada masa kini dan yang akan datang. Revitalisasi peternakan dan kesehatan hewan mengamanatkan kepada kita untuk diletakkan pada proporsi yang sebenarnya.

2. PERMASALAHAN

Permasalahan merupakan hal yang menjadikan masalah, dimasalahkan ataupun persoalan, yang dihadapi BBVet Wates. Termasuk permasalahan dalam hal ini meliputi kelemahan (*weakness*), yang bersifat internal, dan ancaman (*threat*) yang bersifat eksternal. Dalam perencanaan strategis BBVet Wates 2015-2019 beberapa permasalahan penting baik bersifat internal maupun eksternal yaitu:

2.1. Penyelenggaraan Kesehatan Hewan Nasional

Penyelenggaraan kesehatan hewan pada wilayah pelayanan BBVet Wates berpedoman pada 'Sistem Kesehatan Hewan Nasional' yang selanjutnya disebut 'Siskeswanas', hal ini merupakan bagian yang harus dipersepsikan untuk bersinergi dengan Penyelenggaraan Agribisnis Peternakan Nasional, sehingga penyelenggaraan kesehatan hewan harus berjalan bersinergi dan seiring dengan agribisnis peternakan. Hal ini disebabkan karena pengertian kesehatan hewan merupakan urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, layanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan perawatan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, keamanan pangan dan pakan asal hewan serta kesejahteraan hewan. Sedangkan peternakan merupakan segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik benih, bibit/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, paska panen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaannya. Keduanya harus bersinergi untuk menangani masalah yang ada.

Disamping itu, kedua penyelenggaraan tersebut harus juga bersinergi dengan pelaksanaan otonomi daerah, sehingga koordinasi dan kerjasama secara keseluruhannya harus ditingkatkan, demikian juga pembentukan dan pelaksanaan jejaring kerja harus ditingkatkan.

Sementara itu, secara internal dan eksternal dalam kelembagaan BBVet Wates masih memiliki beberapa permasalahan yaitu:

- a) **Pengembangan berkelanjutan Sumber daya manusia dan prasarana**
Secara internal, sebagai laboratorium yang bertugas melaksanakan pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan serta pengembangan teknik dan metode penyidikan, diagnosa dan pengujian veteriner pengembangan sumber daya manusia masih menjadi fokus perhatian di masa mendatang. Tugas pemerintah adalah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dengan segala aspeknya masih menuntut kapasitas SDM serta sarana prasarana yang ada yang belum sesuai dengan standart yang ditetapkan, tetapi dengan upaya yang berkelanjutan mulai dapat dipenuhi secara bertahap sehingga layaknya menjadi percontohan UPT veteriner yang berskala nasional dan regional.
- b) **Otonomi daerah dan desentralisasi**
Secara internal dalam wilayah kerjanya, adanya otonomi daerah di wilayah kerjanya menimbulkan keragaman dalam aspek pengendalian dan penanggulangan penyakit. Selain itu dari segi kelembagaan adanya variasi nomenklatur dinas yang membidangi aspek kesehatan hewan yang menimbulkan prioritas kebijakan yang bervariasi antar daerah. Variasi ini meimbulkan pula perbedaan anggaran pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan yang sangat berbeda sehingga

terdapat daerah yang relatif maju dalam aspek kesehatan hewannya dan daerah yang relatif tertinggal. Sehingga sejauh ini koordinasi dan kesinergian dengan perangkat kelembagaan daerah masih belum optimum dalam pelaksanaannya.

c) *Trans-boundary Diseases*

Secara eksternal dan secara simultan akan menjadi ancaman yang besar dengan muncul dan menyebarnya penyakit hewan menular dari negara lain, sesuai dengan peningkatan peredaran hewan dan produk hewan baik antar wilayah di dalam negeri, maupun dari luar negeri, yang tidak mengenal batas negara (*trans-boundary diseases*) yang memerlukan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara cepat dan sistematis, tetapi juga tantangan manajemen sumberdaya, tantangan hubungan masyarakat dan tantangan manajemen informasi serta yang lebih penting lagi adalah tantangan dan rencana menghadapi kesiagaan darurat (*emergency preparedness* dan *emergency plan*) terhadap penyakit yang tergolong *emerging disease* dan *re-emerging disease*.

d) Peningkatan peredaran komoditas secara ilegal.

Peningkatan peredaran secara eksternal tersebut meliputi peredaran hewan, produk hewan, obat-obatan, dan pakan yang menggunakan pemalsuan, rekayasa genetik (*Genetic Engineering*), GMO (*Genetic Modified Organism*), serta penggunaan sebagai senjata biologik (*Biologic Weapon*) ataupun bioterorisme (*Bioterrorism*). Hal-hal tersebut harus dapat ditangani oleh BBVet Wates, yang berupa pelayanan untuk masyarakat, bangsa dan negara.

e) Optimalisasi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pendekatan pembebasan suatu penyakit berdasarkan per-unit usaha peternakan atau kompartemen dan produk hewan, berdasar zona atau pulau dan wilayah administrasi lainnya, serta negara. Upaya-upaya tersebut dikenal sebagai upaya pelaksanaan kompartementalisasi dan zonasi.

2.1. Penyelenggaraan Agribisnis Peternakan Nasional

Penyelenggaraan agribisnis peternakan, difokuskan pada pelaksanaan yang bersifat kerakyatan dan berdasarkan kearifan lokal serta berkelanjutan, dalam pelaksanaannya masih banyak menghadapi permasalahan baik secara nasional maupun regional pada wilayah pelayanan BBVet Wates. Pelaksanaan agribisnis peternakan hendaknya mengacu pada 'Sistem Agribisnis Peternakan Nasional' yang selanjutnya dapat disebut 'Sisagrinas', yang secara prinsip sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan daya saing dan efisiensi untuk memenuhi kebutuhan pasar dan konsumen. Pelaksanaan Sisagrinas ini diharapkan bersinergi dengan Sikeswanas untuk mewujudkan kedaulatan pangan.

Kesinergian secara internal antara Siskeswanas dan Sisagrinaknas sejauh ini masih menghadapi permasalahan ataupun hambatan, sehingga berdampak pada rendahnya daya saing dan efisiensi pada produk-produk yang dihasilkan, yang terkait pada keamanan, kesehatan, kualitas produk, termasuk juga pelaksanaan kesejahteraan hewan selama proses budidaya, produksi, transportasi, pemotongan, pengolahan, dan pemasaran hasil dan produk peternakan.

Permasalahan-permasalahan tersebut terjadi baik secara umum maupun secara khusus tergantung komoditas peternakan, seperti daging, susu, dan telur ataupun jenis ternak, seperti sapi potong, sapi perah, unggas dan lain-lainnya. Permasalahan tersebut untuk solusinya nampaknya memerlukan kesinergian dan juga pendekatan lainya seperti halnya restrukturisasi, ataupun revitalisasi usaha peternakan.

a) Masih timbulnya penyakit hewan menular strategis dan tidak strategis serta *re-emerging diseases*.

Permasalahan yang sedang dihadapi pada saat ini yaitu penyakit *Avian Influenza* (AI) yang masih berjangkit di beberapa daerah di Indonesia. Sedikitnya terdapat empat jenis penyakit yang menyerang komoditas unggas, yaitu *Infectious Bronchitis* (IB), *Infectious Bursal Disease* (IBD), *Colibacillosis* pada ayam pedaging dan *Infectious Laryngo Tracheitis* (ILT) pada ayam petelur. Sedangkan pada Hewan Besar adalah penyakit *Brucellosis* pada sapi perah dan potong, *Anthrax*, *ParaTB (John's Disease)*, *BVD*, *IBR*, *Hog colera* pada babi serta *ancaman tertularnya kembali Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)*, *Hendra* pada babi dan penyakit *Ebola*. Permasalahan rutin yang sering terjadi penggunaan Kit yang model dan spesifikasinya belum terstandar dan pemesanannya harus ke luar negeri dan waktunya cukup lama terutama untuk Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS). Selain itu masalah eksternal lainnya adalah beragamnya system peternakan dan kesehatan hewan di wilayah kerja BBVet Wates sehingga komitmen dan perhatian terhadap pengendalian penyakit hewan belum dapat distandarisasi. Permasalahan ini diperkirakan tetap jadi topik dari tahun 2015 – 2019.

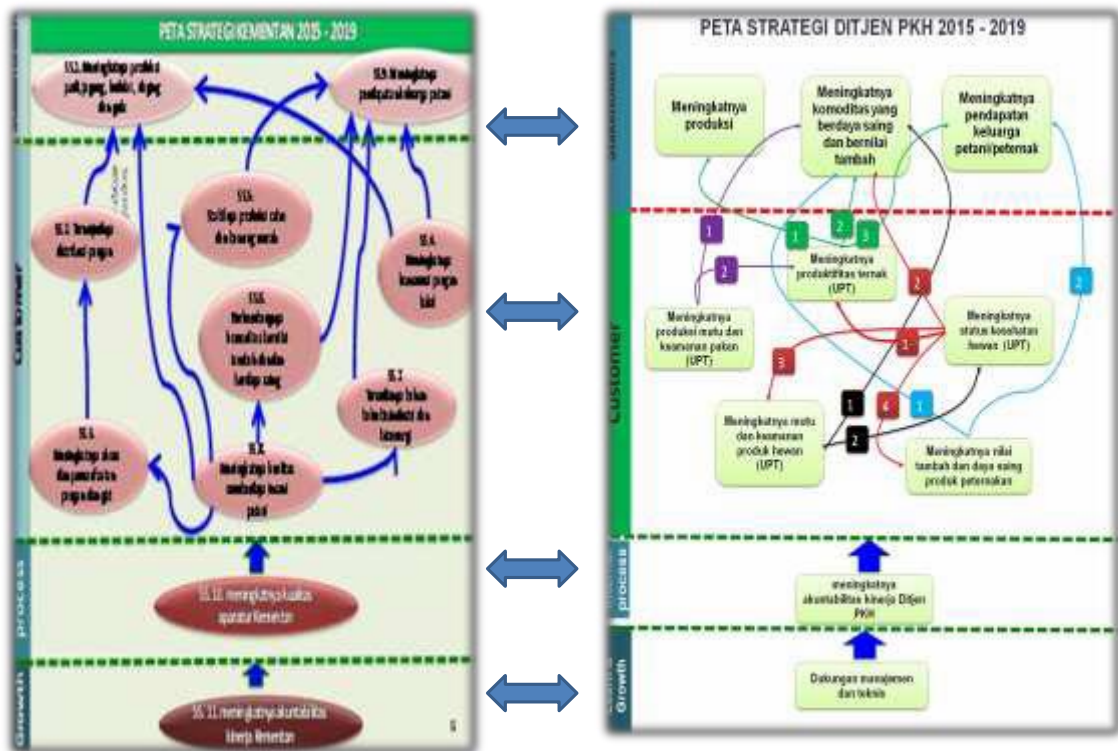
b) Masih rendahnya keamanan dan mutu produk peternakan baik bahan pangan asal hewan maupun pakan hewan.

Keamanan dan mutu produk peternakan, baik sebagai bahan pangan asal hewan maupun bahan pakan hewan di wilayah pelayanan BBVet Wates masih cenderung rendah, hal ini dikarenakan pelaksanaan cara budidaya, panen-pasca panen, pengangkutan, pemotongan hewan, pengolahan, penjajaan atau pemasaran masih banyak yang dilakukan belum memenuhi standar minimum yang dapat dilakukan. Misalnya peredaran daging dan susu yang belum memenuhi standar minimum keamanan dan mutu produk, dan lain-lainnya, termasuk juga standar aman, sehat, utuh dan halal.

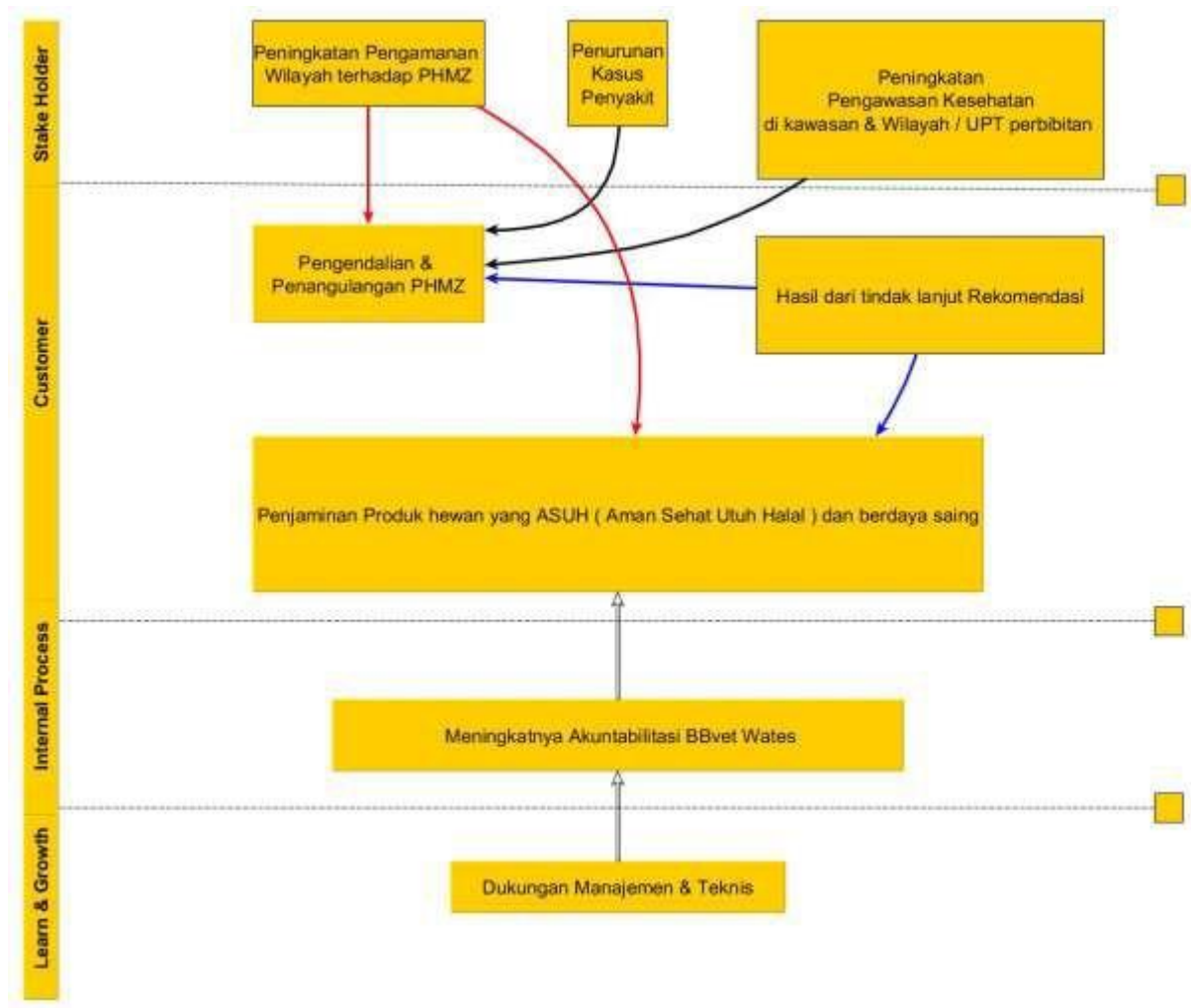
- c) **Masih rendahnya perhatian pelaksanaan kesejahteraan hewan**
Kesejahteraan hewan pada masa-masa kedepan harus dilaksanakan mulai budidaya, panen-pascapanen, pengangkutan, penjajaan, pemasaran dan pemotongan hewan. Hal-hal tersebut masih juga terjadi di wilayah pelayanan BBVet Wates, sehingga permasalahan dalam hal kesejahteraan hewan harus dapat ditangani sesuai dengan standar yang diperlukan.
- d) **Rendahnya daya saing produk lokal terhadap produk impor**
Hewan dan produk hewan yang diproduksi peternak berskala kecil di dalam negeri mempunyai daya saing rendah, terkait keamanan, kesehatan, dan mutunya, hal ini terjadi baik secara internal maupun eksternal. Sehingga pendekatan agribisnis dengan pola kemitraan menjadi salah satu upaya yang harus dilaksanakan.

III. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Pertanian tersebut dan menjaga konsistensi program maka pembangunan peternakan dan kesehatan hewan melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dilakukan penyesuaian. Begitu pula Balai Besar Veteriner Wates telah melakukan revisi agar sesuai dengan konsistensi program Kementerian Pertanian dan Ditjen PKH. Walaupun demikian untuk menyusun revisi Renstra BBvet Wates tersebut terlebih dahulu mengacu pada peta strategis Kementerian Pertanian 2015-2019, dan Ditjen PKH serta cascading organisasi BBvet Wates sebagai salah satu eselon II yang mendukung sasaran strategis Ditjen PKH. Dari peta strategis tersebut dibuatlah keterkaitan dengan peta strategis BBvet Wates, yang dapat digambarkan pada diagram berikut ini:



Bagan 1.1. Peta Strategis Kementerian Pertanian dan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan



Bagan 1.2. Peta Strategis Ditjen PKH dan Balai Besar veteriner Wates.

Diagram ini menggunakan pendekatan *balance score card* yaitu: pendekatan yang lebih komprehensif dengan empat perspektif antara lain *learn growth*, proses internal, customer dan stakeholder untuk mencapai tujuan, sasaran, misi dan visi organisasi.

Pendekatan *balance score card* ini dipakai agar lebih objektif dan komprehensif yang mengandung arti bahwa kinerja diukur tidak saja dari segi finansial maupun non finansial karena selama ini kinerja finansial cenderung dinyatakan berhasil jika dapat menyerap 100% anggaran walaupun hasil dari program dan kegiatan yang dilaksanakan masih berada di bawah standar.

3.1. Visi

Menjadi laboratorium veteriner handal dengan reputasi internasional.

BBVet Wates memiliki **Motto**: Uji cepat dan akurat, menjamin hewan sehat, masyarakat sejahtera. Serta **Janji layanan**: Profesional Cepat Akurat, Masyarakat puas.

3.2. Misi

- a) Meningkatkan integritas, kemampuan serta keahlian sumber daya manusia agar mampu mengantisipasi perubahan global.
- b) Mempertahankan dan meningkatkan kualitas laboratorium berbasis akreditasi untuk memperkuat kapasitas dan daya saing pada level internasional.
- c) Mewujudkan pelayanan prima dalam rangka pengabdian masyarakat dengan meningkatkan profesionalisme veteriner dan mutu layanan laboratoris dalam bidang penyidikan, pengamatan, pengujian dan diagnosa kesehatan hewan dan keamanan produk hewan.
- d) Membangun dan mengelola Sistem Informasi Veteriner dalam penyediaan data laboratorium yang cepat dan tepat waktu berdasarkan hasil penyidikan, pengamatan, pengujian dan diagnosa yang valid dan akurat.
- e) Membangun pemberdayaan dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran pentingnya penanganan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta kesehatan lingkungan secara terpadu dengan pendekatan *One Health*.

3.3. Tujuan

Tujuan Balai Besar Veteriner Wates yang tertuang dalam Renstra periode 2015-2019 terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus.

- a) Tujuan Umum
Peningkatan peran sebagai laboratorium penyidikan, pengujian dan diagnostik serta sebagai laboratorium rujukan melalui peningkatan pemanfaatan sumber daya dan teknologi dalam perencanaan dan pelaksanaan serta pengendalian kegiatan Balai sesuai tugas dan fungsi.
- b) Tujuan Khusus
 - (a) Peningkatan penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta dana yang tersedia dalam meningkatkan daya saing.
 - (b) Peningkatan kompetensi teknis sumberdaya manusia yang tersedia untuk melayani pemangku kepentingan dan tantangan era globalisasi.
 - (c) Peningkatan pelayanan dibidang penyidikan keswan dan pengujian kesmavet melalui kegiatan monitoring, surveillans, pemetaan, peringatan dini, pemeriksaan dan pengujian serta pelaporan.

- (d) Peningkatan kemampuan manajemen aparatur melalui pengembangan sistem informasi veteriner terutama pengelolaan sistem informasi laboratorium dalam mengantisipasi era globalisasi.

3.4. Sasaran

Untuk mewujudkan, visi, misi dan tujuan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, sasaran yang ingin dicapai maka disusun sasaran strategis. Masing-masing sasaran tersebut mempunyai indikator yang ingin dicapai selama kurun waktu 2015 – 2019 yang selanjutnya disebut Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun IKU tersebut dapat dirumuskan pada Tabel 1. Dikarenakan adanya revisi renstra dari Ditjen PKH , untuk itu BBVet wates juga melakukan revisi renstra untuk menyesuaikan dengan Renstra Ditjen PKH terutama dalam hal sasaran strategis dan indicator kinerja utama.

Tabel1. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama BBVet Wates

| No | Sasaran strategis | Kode | Indikator Kinerja | Target | |
|----|---|------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | 2018 | 2019 |
| 1 | Meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan Balai Besar Veteriner | 1-1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Besar Veteriner | 4.00 Skala Likert | 4.00 Skala Likert |
| 2 | Meningkatnya pendapatan PNBP Balai Besar Veteriner | 2-1 | Jumlah Pendapatan PNBP Balai Besar veteriner | 1,600 Juta Rupiah | 1,600 Juta Rupiah |
| | | 2-2 | Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan Balai Besar Veteriner yang terjadi berulang | 0.00 temuan | 0.00 temuan |
| 3 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Balai Besar Veteriner | 3-3 | Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB 12 tahun 2015) | 0.00 temuan | 0.00 temuan |
| 4 | Meningkatnya luas wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis | 4-4 | Pengamatan dan identifikasi penyakit hewan | 19,944 sampel | 22,754 sampel |
| 5 | Meningkatnya luas wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis | 5-5 | Kelembagaan Veteriner | 17 Unit | 1.00 Unit |

| | | | | | |
|---|---|-----|---|--------------|----------------|
| 6 | Terpenuhinya kebutuhan pangan hewani asal ternak strategis nasional | 6-1 | Penanggulangan gangguan reproduksi | 141,600 ekor | 20,000 ekor |
| 7 | Terjaminnya keamanan pangan strategis nasional | 7-1 | Pengawasan mutu dan keamanan produk | 835 sampel | 2,000 sampel |
| 8 | Peningkatan konsumsi protein hewani dan peningkatan pendapatan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) | 8-1 | Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak (#BEKERJA) | 902,800 Ekor | 1,029,300 Ekor |

Dengan adanya sasaran strategis dan indikator kinerja utama tersebut setiap individu pegawai dapat diukur kinerja individunya untuk diketahui sejauh mana kontribusinya dalam mendukung pencapaian strategi BBVet Wates. Dengan komitmen bersama dari seluruh pejabat serta penerapan lima nilai yaitu komitmen, keteladanan, profesionalisme, integritas dan disiplin maka tujuan bersama untuk menjadikan Balai Besar Veteriner Wates menjadi organisasi yang fokus pada strategi untuk mencapai visinya Menjadi laboratorium veteriner handal dengan reputasi internasional.

Rincian target kinerja program dan kegiatan serta alokasi dananya per tahun dalam kurun waktu tahun 2017 – 2019 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Rincian Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017- 2019

| No | Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Operasional | Satuan | Target | | | Anggaran (Rp. 000,000) | | |
|----|--|--------|--------|--------|--------|------------------------|-------|---------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| I | Peningkatan Produksi Pakan Ternak | | | | | | | |
| | 1. Surveilans keamanan pakan/ bahan pakan | Sampel | - | 900 | 80 | 0 | 250 | 221,164 |
| II | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis | | | | | | | |
| | 1. Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan | Sampel | 21,000 | 21,250 | 21,500 | 2,285 | 2,434 | 2,634 |
| | 2. Penyusunan peta penyakit hewan | Peta | 3 | 3 | 3 | 20 | 20 | 20 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---------|---------|---------|---------------|--------|----------|--------|
| | 3. Pengembangan metode diagnosa dan pengujian penyakit hewan | Metoda | 3 | 3 | 3 | 200 | 200 | 200 |
| | 4. Bimbingan lab B & C | Unit | 12 | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 |
| | 5. Bimbingan Teknis Puskesmas | Unit | 100 | 100 | 100 | 352 | 352 | 352 |
| | 6. Penanggulangan gangguan reproduksi pada sapi / kerbau | Ekor | 171,456 | 141,600 | 20,000 | 50,879 | 36,279 | 6,280 |
| III | Penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak(Bekerja) | ekor | - | 764,500 | 1,029,300.424 | - | 38,989.5 | 62,108 |
| IV | Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan berdaya saing | | | | | | | |
| | 1. Monitoring dan surveilans dan cemaran mikroba | Sampel | 1,800 | 1,800 | 2,000 | 900 | 900 | 985 |
| | 2. Surveilans zoonosis produk hewan | Sampel | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| V | Meningkatnya akuntabilitas Balai (BBVet Wates) | | | | | | | |
| | 1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 9,370 | 10,500 | 10,904 |

IV. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

4.1. Paradigma pelayanan Veteriner

Dalam pelayanan veteriner atau kesehatan hewan sudah berkembang dari pendekatan *Animal Disease* menjadi *Animal Health*. Pendekatan *Animal Health* dilakukan melalui pendekatan kesehatan hewan dalam kelompok (*Herd Health*) atau pendekatan melalui populasi (*Disease Management in Population*). Pendekatan ini menyebabkan kesehatan hewan dapat menjadi titik sentral dalam pembangunan peternakan untuk masyarakat luas (*Public Good*) yaitu menjamin kesehatan masyarakat dari ancaman berbagai penyakit. Lebih dari 200 kasus zoonosis yang telah diketahui beberapa abad yang lalu dan selama beberapa dekade terakhir rata-rata muncul 1 (satu) penyakit berbahaya setiap tahunnya dan sekitar 75% dari penyakit tersebut adalah *emerging* maupun *re-emerging* zoonosis.

Untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran BBVet Wates sebagaimana telah disampaikan terdahulu maka diperlukan kebijakan dan strategi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan analisis *SWOT* rumusan-rumusan kebijakan dan strategi tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut

4.2. Identifikasi Faktor-Faktor Internal dan Eksternal

Untuk mengetahui faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh BBVet Wates dilakukan analisis *SWOT* (*Strenght, Weakness, Opportunity, Threat*). Dari serangkaian *Fokus Group Discussion* (*FGD*) dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Analisis Lingkungan Strategis

| Aspek Internal | Aspek Eksternal |
|---|--|
| <p>Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan SDM b. Sertifikat ISO 17025:2008 dan ISO 9001:2015 c. Populasi hewan (potensi ternak) dan produk hewan d. Kelembagaan, Sarana-prasarana e. Kemudahan akses f. Ketersediaan biotek dan teknologi g. Standar kepuasan pelayanan (Ombudsman) h. Peraturan perundang-undangan (UU, PP, Permentan) | <p>Peluang</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Meningkatnya masyarakat kelas menengah dan kesadaran masyarakat akan program ASUH (b) Diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), <i>fair trade</i>, <i>SPS-TBT AEC</i> (<i>Asean Economic, community</i>). (c) Kerjasama dalam negeri dan luar negeri (d) Perdagangan hewan dan produk hewan antar wilayah dan antar negara (e) Kebijakan veteriner Indonesia dengan pemerintah daerah dan swasta sebagai laboratorium rujukan (f) Meningkatnya turisme, transportasi dan komunikasi |

| Kelemahan | Ancaman |
|--|---|
| a) Pelayanan veteriner belum seimbang (daerah, populasi komoditi ternak, PHM), terbatasnya ketersediaan SDM berkompetensi yang berkelanjutan | (a) Pemalsuan komoditas peternakan dan peredaran/penggunaan obat hewan |
| b) Pengendalian dan penanggulangan PHM bervariasi antar daerah | (b) Penyakit <i>emerging</i> , <i>reemerging</i> , dan <i>transboundary</i> |
| c) Usaha bidang Peternakan skala kecil (<i>small holder</i>) | (c) Peningkatan lalu lintas barang dan jasa baik antar negara ASEAN, antar negara, maupun antar wilayah |
| d) Peran/partisipasi masyarakat | (d) Munculnya laboratorium sejenis dari privat / swasta |
| e) Pemahaman SISKESWANAS dan SISAGRINAKNAS | (e) Penggunaan senjata biologik atau bioterorisme |
| f) Jejaring antar laboratorium | (f) Penggunaan rekayasa genetika mikroorganisme dan GMO (<i>Genetic Modified Organism</i>) |
| g) Standar baku UPT eselon 2 | (g) Tertularnya/masuknya kembali <i>Rabies</i> ke wilayah kerja BBVet Wates |
| h) <i>Law enforcement</i> | |
| i) Tanah rawan bergerak/gempa | |

4.3. Strategi

Berdasarkan analisis *SWOT* tersebut maka strategi yang menjadi acuan BBVet Wates untuk tahun 2015-2019 adalah:

- a) Peningkatan ketersediaan SDM yang berkompetensi secara berkelanjutan melalui pendidikan dan latihan yang berkelanjutan yang dilakukan secara adil, transparan dan proporsional melalui *fit and proper test*.
- b) Peningkatan dan penerapan standar pengembangan melalui inovasi pengetahuan teknis bidang *public awareness*, pengkajian residu obat hewan dan cemaran mikroba, forensik veteriner dan aspek kesejahteraan hewan
- c) Pendayagunaan peran fungsi BBVet Wates untuk berperan dalam jaringan lembaga serta keterlibatan masyarakat melalui perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang memihak kepentingan masyarakat
- d) Peningkatan pengembangan dan kajian terbatas teknis dan metode pengujian, diagnosa, penyidikan veteriner
- e) Peningkatan sistem informasi yang mudah dan dapat diakses melalui pengembangan teknologi informasi yang sedang berjalan dan yang akan datang, termasuk I-SIKHNAS.

4.4. Kebijakan Operasional

Kebijakan operasional adalah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran serta strategi BBVet Wates yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Peningkatan SDM BBVet Wates
Peningkatan kompetensi dan moral aparaturnya BBVet Wates melalui

peningkatan kompetensi laboratorium dan perawatannya yang ada di BBVet Wates untuk menuju laboratorium referensi di tingkat nasional dan regional

- b) Peningkatan dan pengembangan standar pengetahuan teknis tentang laboratorium
Peningkatan dan pengembangan dilakukan melalui inovasi pengetahuan teknis laboratorium melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan dengan lembaga veteriner yang lebih tinggi di kawasan internasional. Secara nasional pengembangan standar pengetahuan teknis dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga atau laboratorium yang dimiliki oleh kelembagaan kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian lainnya.
- c) Peningkatan peran dan fungsi BBVet Wates dalam perumusan kebijakan Untuk peningkatan peran dan fungsi ini agar perumusan kebijakannya dapat diterima oleh masyarakat diperlukan keikutsertaan atau partisipasi masyarakat. Oleh karena itu *public awareness* merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan peran dalam perumusan kebijakan.
- d) Peningkatan sistem informasi
Untuk meningkatkan sistem informasi yang berubah cepat maka updating terhadap sistem informasi yang sudah ada akan terus dilakukan. Peningkatan ini menyangkut sarana *software, hardware, brainware*, dan jaringannya, terfokus pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan peran serta masyarakat.
- e) Peningkatan kesempatan untuk menempuh pendidikan dan pelatihan
Peningkatan kesempatan ini ditempuh melalui pendidikan formal diploma, S1, S2, dan S3 serta pendidikan keahlian fungsional baik bagi medik veteriner dan paramedik veteriner. Pendidikan dan pelatihan ditempuh baik didalam negeri maupun di luar negeri. Dapat dipertimbangkan juga pelatihan dan pendidikan yang memang dirancang khusus untuk kebutuhan BBVet Wates (*tailor made*), dan dilaksanakan secara berkelanjutan.

Secara operasional dan fungsional kebutuhan-kebutuhan pelatihan dan pendidikan tersebut untuk:

- (a) peningkatan kualitas pengamatan, survailan, survey dan monitoring penyakit hewan strategis, penyakit zoonosis dan penyakit hewan eksotik
- (b) peningkatan kualitas pemeriksaan, pengujian penyakit hewan menular strategis, penyakit hewan zoonotik, dan penyakit hewan eksotik
- (c) peningkatan kualitas informasi penyakit hewan menular strategis, penyakit hewan zoonotik dan penyakit hewan eksotik
- (d) peningkatan jaminan mutu hasil pemeriksaan dan pengujian penyakit hewan menular strategis, penyakit hewan zoonotic, penyakit hewan eksotik, dan keamanan produk hewan
- (e) peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat untuk mengurangi keluhan dan ketidak puasan pelayanan masyarakat

Bagan2. Skema analisa swot

Dengan demikian ditingkat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan maka Balai Besar Veteriner Wates merupakan salah satu pendukung untuk tercapainya indikator sasaran program, sasaran strategis dan sasaran program yang telah disusun. Adapun indikator sasaran strategis dan indikator sasaran program dan keterkaitannya dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan 3. Skema Indikator Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Program BBVet Wates

V. PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN

A. Berdasarkan analisa swot dirumuskan program dari BBVet Wates yang substansinya dikaitan dengan:

1. Keterkaitan dengan tujuan program ditjen PKH
Tujuan yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan pembangunan peternakan dan kesehatan Hewan, adalah:

- a. Meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas ternak;

Peningkatan populasi dilakukan dengan peningkatan kelahiran dan penekanan kematian dan pelayanan kesehatan hewan. Peningkatan produksi daging telur dan susu sebagai dampak dari peningkatan populasi yang akan meningkatkan produksi ternak. Produktivitas ternak diperoleh dengan peningkatan berat badan, produksi karkas, meningkatnya jumlah induk yang bertelur dan induk yang menghasilkan susu dan pencegahan penyakit hewan menular sehingga peningkatan populasi, produksi dan produktivitas merupakan segitiga yang saling tidak terpisahkan.

Dukungan BBVet Wates dalam mendukung tujuan ini adalah berupa output hasil pengujian dan diagnosa serta sampling surveilans PHMSZ yang sesuai dengan perjanjian kontrak kinerja, dan outcome berupa hasil dari tindak lanjut rekomendasi teknis dari BBVet Wates terhadap institusi dinas peternakan yang terkait untuk melaksanakan kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan penyakit hewan. Sebagai contoh adalah pembebasan penyakit Brucellosis pada sapi potong di Pulau Madura, dukungan surveillans kesehatan hewan di wilayah sumber bibit dan UPT Perbibitan, peningkatan populasi dari kegiatan penanggulangan gangguan reproduksi, peningkatan berat badan sapi dari hasil surveillans dan pengobatan penyakit hewan.

- b. Meningkatkan kualitas komoditas ternak;

Kualitas komoditas ternak diperoleh dengan penyediaan bibit yang baik (*good breeding practices*), budidaya yang baik (*good farming*), penyediaan pakan yang baik (*good feeding practices*), penanganan pengolahan dan pemotongan yang baik (*good slaughtering*) dan *good proces practices* serta penanganan produk untuk pemasaran hasil ternak (*good marketing practices*). Peningkatan kualitas komoditas ternak ini dimulai dari sejak dari hulu sampai hilir (*from the farm to table*).

Dukungan BBVet Wates dalam mendukung tujuan ini adalah secara rutin melaksanakan kegiatan surveillans dan pegujian status kesehatan hewan di wilayah sumber bibit dan kawasan ternak yang diusulkan oleh

pemerintah daerah setempat dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing ternak unggul lokal antara lain sapi PO Kabupaten Kebumen, Sapi Jabres Kabupaten Brebes, Sapi Madura di Kabupaten Pamekasan, Kambing PE Kaligesing Kabupaten Purworejo, Kambing Senduro di Kabupaten Lumajang, dan lain lain. Selain itu BBVet Wates secara rutin melakukan kegiatan surveilans kesehatan hewan di BPTU HPT Baturraden dan BBIB Singosari baik secara aktif maupun pasif.

c. Meningkatkan produk hewan yang ASUH dan berorientasi ekspor Indonesia merupakan negara terbesar yang beragama Islam maka produk hewan yang dihasilkan harus ASUH. Selain produk yang ASUH maka produk peternakan tersebut sudah mulai harus berorientasi ekspor. BBVet Wates melaksanakan surveillans dan pengujian produk hewan dalam rangka menjamin keamanan pangan dan ASUH (Aman Sehat Utuh Halal) serta mendorong peningkatan kualitas produk hewan untuk menambah daya saing.

d. Meningkatkan status kesehatan hewan;

Status kesehatan hewan yang diharapkan yaitu bebasnya Indonesia dari berbagai penyakit hewan menular strategis, misalnya Rabies, Brucellosis, Anthrax, Avian Influenza, Hog Cholera dan lainnya. Saat ini penyakit tersebut di atas masih menjadi ancaman diberbagai wilayah di bagi Indonesia dan menjadi penyakit sporadik dan endemic. Dalam rangka meningkatkan status kesehatan hewan penyakit yang bersifat wabah harus secara bertahap dibebaskan.

Kontribusi BBvet Wates dalam mendukung pengendalian penyakit hewan di wilayahnya berupa output hasil pengujian dan diagnosa serta pelaksanaan surveilans PHMSZ yang sesuai dengan perjanjian kontrak kinerja, dan outcome berupa hasil dari tindak lanjut rekomendasi teknis terhadap institusi dinas peternakan. Sebagai contoh adalah pembebasan penyakit Brucellosis pada sapi potong di Pulau Madura, Surveillans penyakit PHMSZ serta dukungan surveillans kesehatan hewan di wilayah sumber bibit dan UPT Perbibitan.

e. Meningkatkan pendapatan peternak.

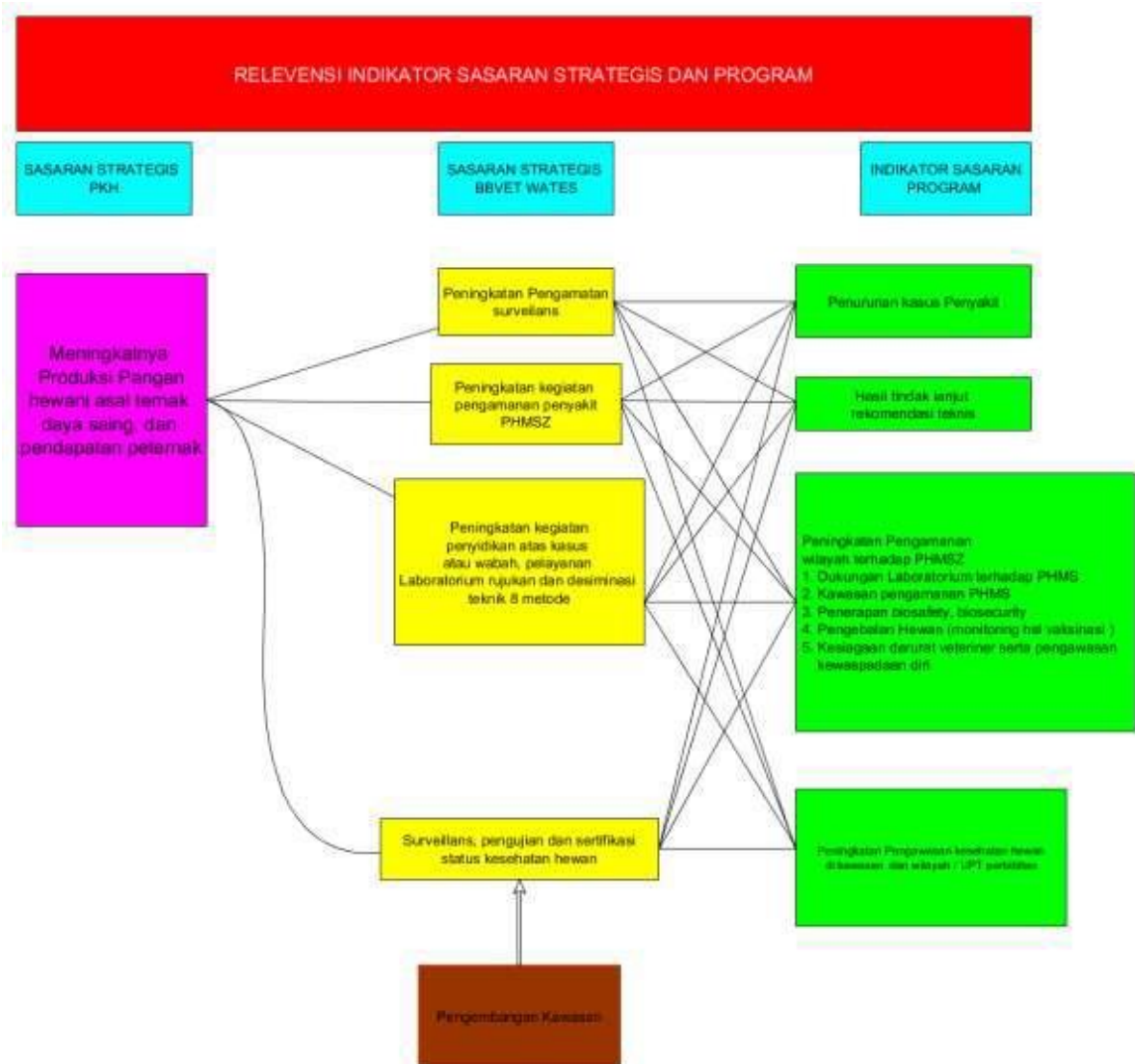
Pendapatan peternak dapat meningkat sebagai akibat dari kegiatan teknis yaitu pelayanan kesehatan hewan, penanganan gangguan reproduksi, perbaikan pakan, peningkatan kualitas bibit, pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, Peningkatan pendapatan peternak diperoleh melalui peningkatan efisiensi usaha peternakan dan peningkatan nilai tambah dari usaha peternakan yang dikelola. Kedua pendekatan ini harus saling bersinergi untuk

meningkatkan pendapatan peternak. Pendapatan peternak diukur dari indeks yang diterima peternak dari hasil ternaknya dibandingkan jumlah yang harus ~~dibayar~~ dikeluarkan oleh peternak

Dukungan BBVet Wates terhadap kegiatan ini adalah outcome yang dihasilkan dari kegiatan surveillans penyakit PHMSZ, tindak lanjut kasus penyakit dan wabah, penanggulangan gangguan reproduksi, serta surveillans kesehatan hewan di wilayah sumber bibit dan UPT Perbibitan.

2. Keterkaitan dengan sasaran program ditjen PKH
Untuk mewujudkan, visi, misi dan tujuan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, sasaran yang ingin dicapai adalah: meningkatnya produksi pangan asal hewan, daya saing dan kesejahteraan peternak.

BBVet Wates dalam hal ini telah mencanangkan renstra dengan sasaran yang mendukung sasaran renstra Ditjen PKH.



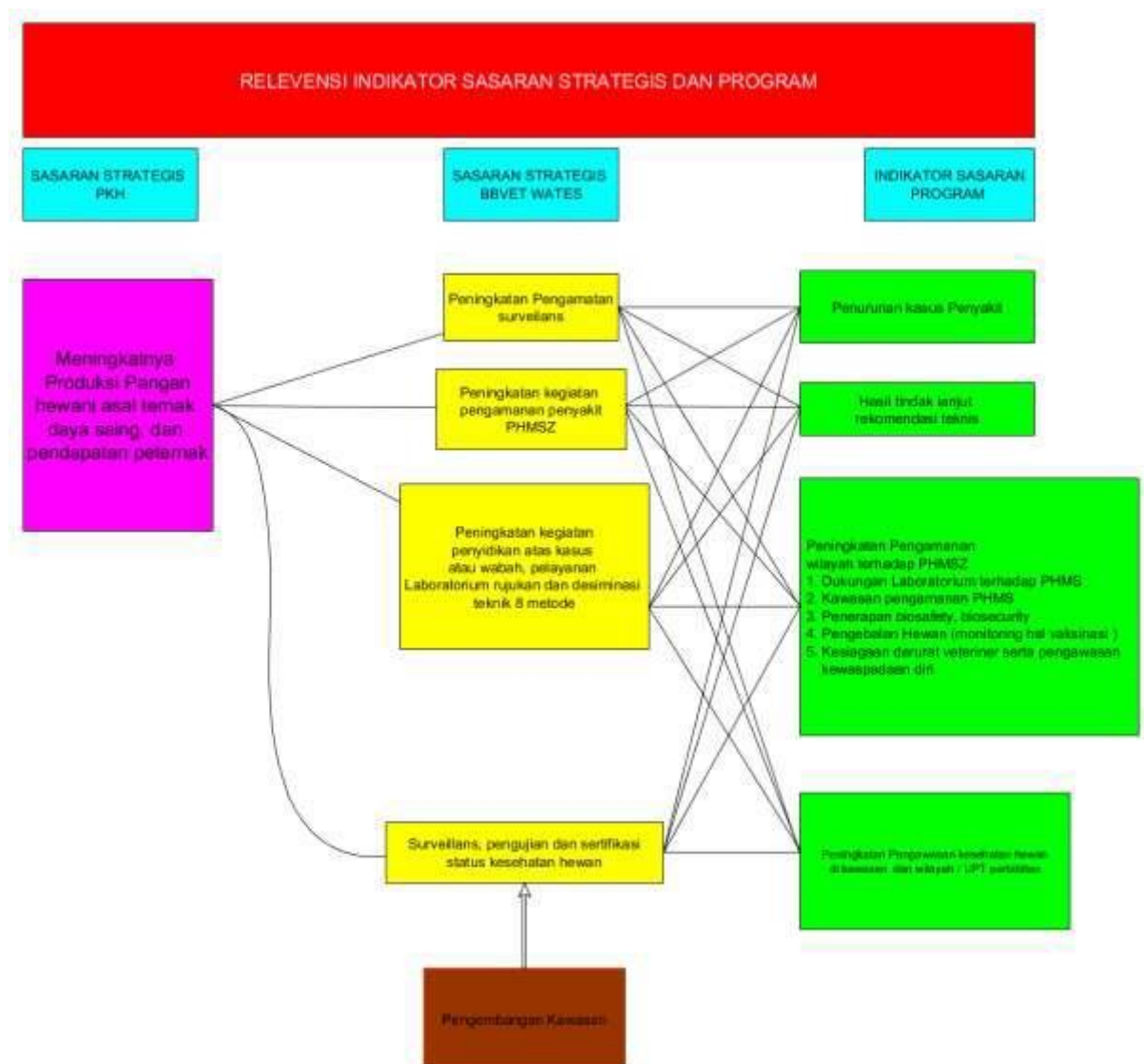
Bagan 4. Relevansi indikator sasaran strategis dan program

3. Keterkaitan dengan kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan pemenuhan produk hewan yang ASUH serta kesejahteraan hewan

BBvet Wates telah melakukan kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit terutama PHMSZ yang selaras dengan program kegiatan Ditjen PKH serta surveillans pada produk hewan yaitu PMSRCM serta penyakit zoonosis untuk pemenuhan produk hewan yang ASUH serta kesejahteraan hewan.

B. Keterkaitan dengan indikator sasaran strategis ditjen PKH dan program BBvet terkait.

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, sasaran yang ingin dicapai adalah: meningkatnya produksi pangan asal hewan, daya saing dan kesejahteraan peternak.



Bagan 5. Indikator Sasaran strategis Balai Besar veteriner Wates yang tidak terlepas dari sasaran strategis Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pada bagan 4.1 tersebut sasaran strategi yang terkait dengan Balai Besar Veteriner Wates tahun 2015-2017 adalah:

1. Penurunan kasus penyakit hewan
2. Hasil tindak lanjut rekomendasi teknis dari Balai terhadap institusi dinas peternakan yang terkait untuk melaksanakan kegiatan pencegahan, penanggulangan.
3. Peningkatan pengamanan wilayah terhadap PHMSZ antara lain:
 - a. Dukungan laboratorium terhadap penetapan PHMS
 - b. Kawasan pengamanan PHMS
 - c. penerapan biosafety dan biosecurity
 - d. Pengebalan hewan (monitoring hasil vaksinasi)
 - e. Pengawasan produk hewan
 - f. Kesiagaan darurat veteriner serta pengawasan kewaspadaan dini
4. Peningkatan pengawasan kesehatan hewan di kawasan dan wilayah/UPT perbibitan.

Sedangkan sasaran strategis yang menyelaraskan revisi renstra PKH 2018-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas layanan public terhadap layanan Balai Besar Veteriner.
2. Meningkatnya pendapatan PNBPN Balai Besar Veteriner
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Balai Besar Veteriner
4. Meningkatnya luas wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis.
5. Terpenuhinya kebutuhan pangan hewani asal ternak strategis nasional
6. Terjaminnya keamanan pangan strategis nasional
7. Peningkatan konsumsi protein hewani dan peningkatan pendapatan bagi rumah tangga miskin (RTM).

C. Kegiatan (Matrik)

Dalam rangka penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi, serta memperhatikan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan, maka dapat disusun program kerja dan kegiatan BBVet Wates pada kurun waktu 2015-

2019. Program kerja dan kegiatan tersebut telah mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia yang telah dilaksanakan baik Medik maupun Paramedik, kompetensi dan keahlian sesuai dengan jumlah yang telah disusun. Ketersediaan SDM tersebut akan diikuti dengan sarana pendukungnya yaitu peralatan laboratorium dan teknik-teknik metodologinya. Dengan memperhatikan program utama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat, maka komoditi dan produk yang akan ditangani adalah komoditas yang dianggap sebagai sumber protein hewani yang berasal dari daging unggas, daging sapi dan kerbau serta telur. Sedangkan komoditas yang berorientasi ekspor yaitu kambing, domba, babi dan unggas. Menyesuaikan dengan tugas dan fungsi BBVet Wates yang berisikan 22 fungsi maka disusun program kerja dan kegiatan sebagai berikut:

5.1. Pengamatan dan Pengidentifikasian Diagnosa

- a) Pelaksanaan penyidikan penyakit hewan;
- b) Pelaksanaan penyidikan melalui pemeriksaan dan pengujian produk hewan;
- c) Pelaksanaan surveilans penyakit hewan, dan produk hewan;
- d) Pemeriksaan kesehatan hewan, semen, embrio, dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan;
- e) Pembuatan peta penyakit hewan regional;
- f) Pelaksanaan analisa risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan di regional;
- g) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

5.2. Pengujian Veteriner dan Produk Hewan

- a) Pelaksanaan pengujian dan pemberian laporan dan/atau sertifikasi hasil uji;
- b) Pelaksanaan pengujian forensik veteriner;
- c) Pelaksanaan pengujian toksikologi veteriner dan keamanan pangan;
- d) Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan;

5.3. Pengembangan Teknik dan Metoda

- a) Pelaksanaan kajian terbatas teknis veteriner;
- b) Pengkajian batas maksimum residu obat hewan dan cemaran mikroba;
- c) Pemberian pelayanan teknis penyidikan, pengujian veteriner dan produk hewan, serta pengembangan teknik dan metoda penyidikan, diagnosa dan pengujian veteriner;
- d) Pelaksanaan pengembangan dan diseminasi teknik dan metoda penyidikan, diagnosa dan pengujian veteriner;

5.4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

- a) Penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan;
- b) Pelaksanaan peningkatan kesadaran masyarakat (*public awareness*);
- c) Pemberian bimbingan teknis laboratorium veteriner, pusat kesehatan hewan, dan kesejahteraan hewan;
- d) Pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan diagnosa penyakit hewan menular;
- e) Pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian veteriner, serta bimbingan teknis penanggulangan penyakit hewan;
- f) Pengembangan sistem dan diseminasi informasi veteriner;
- g) Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBVet.

VI. ARSITEKTUR DAN INFORMASI KINERJA

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah mengamankan agar penganggaran di Indonesia menggunakan cara penganggaran berbasis kinerja dengan orientasi pada *outcome*. Adanya rencana strategis yang memuat kondisi yang ingin dicapai (berbasis dalam *outcome*) dan strategi pencapaiannya berdasarkan kerangka logika yang jelas, relevan dan terukur. Sistem evaluasi diharapkan mampu mengukur capaian atas pelaksanaan rencana strategis sehingga menghasilkan informasi kinerja yang valid dan menjadi bagian integral dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran.

Penerapan sistem penganggaran berbasis *outcome* ini akan diawali dengan penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja dalam dokumen RKA-K/L yang selanjutnya akan diikuti penguatan dan penajaman informasi kinerja yang jelas relevan dan terukur sesuai dengan kaidah kerangka logika program.

Mulai tahun 2016 sepenuhnya akan diterapkan Arsitektur dan Informasi Kinerja yang berbasis *outcome* karena pada tahun 2015 masih dijumpai banyak tumpang tindih antara *input*, *output*, aktivitas dan *outcome*. Pada tahun 2015 bentuk Arsitektur dan Informasi Kinerja BBVet Wates sebagaimana terlampir (Lampiran 1).

Pada Tabel tersebut pendekatan penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja hanya didasarkan pada organisasi dan akan direstrukturisasi pada tahun 2016 didasarkan pada pendekatan fungsi, akibatnya beberapa perubahan harus dilakukan yaitu a) Informasi Kinerja disusun sesuai kerangka logika berpikir *logic model*; b) Setiap level organisasi termasuk BBVet Wates terdapat struktur informasi kinerja yang bersifat baku yaitu *input*, aktivitas, *output* dan *outcome*; c) *Output* dan *Outcome* BBVet Wates dapat merupakan *output-input* Direktorat Kesehatan Hewan sesuai organisasi line sesuai produk; d) Penyusunan indikator *input*, *output* dan *outcome* memenuhi kaidah-kaidah yang disebut SMARTV.

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi BBVet Wates maka dapat disusun Arsitektur dan Informasi Kinerja yang sudah di restrukturisasi sebagai berikut:

Tabel: 4.1. Tentang Rencana Kerja dan Anggaran BBVet Wates

| KINERJA | ANGGARAN (Rp), TARGET DAN REALISASI KINERJA | | | | |
|---|---|-------------------|---------|---------|---------|
| | TARGET/ ANGGARAN 2015 (Juta) | REALISASI KINERJA | | | |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| <i>OUTCOME:</i> | | | | | |
| Peningkatan manajemen dan kegiatan teknis lainnya | | | | | |
| Indikator: | | | | | |
| - Identifikasi dan surveilan di 3 Provinsi yang terdiri dari 78 Kabupaten | 1.782 | 78 Kab. | 78 Kab. | 78 Kab. | 78 Kab. |

| | | | | | | |
|--|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - Dukungan manajemen kesehatan hewan pada 2 Puskesmas dari 25 Puskesmas di DIY, 10 dari 75 Puskesmas di Jawa Tengah, dan 13 dari 84 Puskesmas di Jawa Timur | 340 | 25 Puskesmas | 25 Puskesmas | 25 Puskesmas | 25 Puskesmas | 25 Puskesmas |
| Anggaran (Rp) | 3.558 | | | | | |
| <i>OUTPUT</i> | | | | | | |
| Peningkatan pelayanan kesehatan hewan yang didasarkan pada hasil pengujian dan penyidikan | 97 | 78 Kab. | 78 Kab. | 78 Kab. | 78 Kab. | 78 Kab. |
| Indikator: | | | | | | |
| - diperolehnya status penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis di 78 Kabupaten | 3.084 | 78 Kab. | 78 Kab. | 78 Kab. | 78 Kab. | 78 Kab. |
| - dikeluarkannya rekomendasi hasil uji laboratorium sejumlah 650 rekomendasi/tahun | 377 | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 |
| Anggaran | 5680.5 | | | | | |
| | | | | | | |
| AKTIVITAS: | | | | | | |
| - Pemantauan dan penyidikan pada 32 penyakit hewan menular strategis dan zoonosis | 3.084 | 32 Penyakit hewan | 32 Penyakit hewan | 32 Penyakit hewan | 32 Penyakit hewan | 32 Penyakit hewan |
| - Pengujian sampel Penyakit hewan menular strategis dan zoonosis | 2111.5 | 27.309 sampel | 21.000 sampel | 22.500 sampel | 24.500 sampel | 26.000 sampel |
| - Disusunnya peta pemetaan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis pada 3 propinsi di wilayah kerja BBVet Wates | 10 | 3 Peta penyakit | 3 Peta penyakit | 3 Peta penyakit | 3 Peta penyakit | 3 Peta penyakit |
| - Pelaksanaan pembinaan pada 245 Puskesmas (25 di DIY, 75 di Jawa Tengah dan 145 di Jawa Timur) | 340 | 75 Puskesmas | 75 Puskesmas | 100 Puskesmas | 100 Puskesmas | 100 Puskesmas |
| - Pelaksanaan pengembangan teknik dan metode pengujian sejumlah 3 metode/tahun | 135 | 3 Metode | 3 Metode | 3 Metode | 3 Metode | 3 Metode |
| <i>OUTCOME</i> | | | | | | |
| Peningkatan pelayanan penyidikan, surveillance, monitoring, investigasi penyakit hewan | | | | | | |
| Indikator: | | | | | | |
| - Menurunnya kasus kejadian penyakit hewan menular strategis dan zoonosis di wilayah kerja BBVet Wates sejumlah 0,5% / tahun | 3.084 | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |

| | | | | | | |
|--|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Penurunan kejadian wabah di wilayah kerja BBVet Wates | | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % |
| Anggaran (Rp) | 7905.5 | | | | | |
| <i>OUTPUT</i> | | | | | | |
| Prevalensi penyakit hewan menular strategis dan zoonosis di wilayah kerja BBVet Wates menurun | | | | | | |
| Indikator: | | | | | | |
| - Penurunan jumlah hasil uji positif dibandingkan dengan jumlah sampel yang diperoleh | | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % |
| - Tidak ada laporan kejadian penyakit baru eksotik dan yang bersifat luar biasa yang masuk dari wilayah kerja BBVet Wates | | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Anggaran | 7905.5 | | | | | |
| <i>AKTIVITAS:</i> | | | | | | |
| - Pelaksanaan investigasi, monitoring dan surveilan di wilayah kerja BBVet Wates | 5.234 | 78 Kab. | 78 Kab. | 78 Kab. | 78 Kab. | 78 Kab. |
| - Pelaksanaan pengujian hasil investigasi, monitoring dan surveilan dari wilayah kerja BBVet Wates | 2111.5 | 27.309 sampel | 27.500 sampel | 27.700 sampel | 27.850 sampel | 28.000 sampel |
| - Pengolahan dan analisis data hasil pengujian untuk rekomendasi | 550 | 650 rekomendasi | 655 rekomendasi | 660 rekomendasi | 665 rekomendasi | 670 rekomendasi |
| - Penyusunan peta penyakit hewan menular strategis dan zoonosis di wilayah kerja BBVet Wates | 10 | 3 Peta penyakit | 3 Peta penyakit | 3 Peta penyakit | 3 Peta penyakit | 3 Peta penyakit |

Dari tabel tersebut maka format informasi kinerja BBVet Wates dapat disederhanakan sebagai berikut:

Tabel: 4.2. Informasi Kinerja BBVet Wates 2015-2019

| No | <i>Input</i> BBVet Wates | Aktivitas BBVet Wates | <i>Output</i> BBVet Wates | <i>Outcome</i> BBVet Wates |
|----|--------------------------|---|---|---|
| 1 | Anggaran | - Pemantauan dan penyidikan pada 32 penyakit hewan menular strategis dan zoonosis | Peningkatan pelayanan kesehatan hewan yang didasarkan pada hasil pengujian dan penyidikan | Peningkatan manajemen dan kegiatan teknis lainnya |
| 2 | Gedung dan Bangunan: | - Pengujian sampel Penyakit hewan menular strategis dan zoonosis | | |

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| 3 | SDM | - Disusunnya peta pemetaan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis pada 3 propinsi di wilayah kerja BBVet Wates | | |
| 4 | Peralatan laboratorium dan mesin | - pelaksanaan pembinaan pada 245 poskeswan (25 di DIY, 75 di Jawa Tengah dan 84 di Jawa Timur) | | |
| 5 | Bahan kimia, Kit, reagen dan peralatan habis pakai | - Pelaksanaan pengembangan teknik dan metode pengujian sejumlah 3 metode/tahun | | |
| 6 | Alat transportasi | - pelaksanaan investigasi, monitoring dan surveilan penyakit hewan dan produk hewan di wilayah kerja BBVet Wates | Prevalensi penyakit hewan menular strategis dan zoonosis, serta Penjaminan Produk Hewan yang ASUH di wilayah kerja BBVet Wates menurun | Peningkatan pelayanan penyidikan, surveillance, monitoring, investigasi penyakit hewan, serta Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan berdaya saing |
| 7 | Sampel aktif dan sampel pasif | - Pelaksanaan pengujian hasil investigasi, monitoring dan surveilan penyakit hewan dan produk hewan di wilayah dari wilayah kerja BBVet Wates | | |
| 8 | Hewan Percobaan | - Pengolahan dan analisis data hasil pengujian untuk rekomendasi | | |
| 9 | Lahan | - Penyusunan peta penyakit hewan menular strategis dan zoonosis di wilayah kerja BBVet Wates | | |

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Permentan Nomor 92/Permentan-OT140/12/2011 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014, disebutkan bahwa format standar baku pengukuran indikator *output* untuk BBVet Wates adalah sebagai berikut:

Tabel :4.3. Standar Baku Pengukuran Indikator Kinerja *Output* BBVet Wates Indikator 1.

| INFORMASI INDIKATOR KINERJA | | STANDAR BAKU PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA |
|-----------------------------|--|---|
| 1 | Nama indikator | Diperolehnya status penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis di 78 Kabupaten |
| 2 | Tujuan/Kepentingan | Untuk mengetahui status penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis yang dapat ditindak lanjuti di masing masing kabupaten |
| 3 | Metode Penghitungan | Dengan cara sampling dan penghitungan yang proporsional |
| 4 | Tipe Penghitungan | Kumulatif |
| 5 | Indikator Baru | Indikator lama yang berubah sasaran kerjanya |
| 6 | Kinerja Yang Diharapkan | Diketemukan angka prevalensi penyakit hewan menular strategis dan zoonosis untuk dapat dilakukan tindakan lebih lanjut |
| 7 | Standar Indikator | Angka prevalensi yang diterima oleh <i>stakeholders</i> |
| 8 | Penanggungjawaban Indikator | Kepala Bidang Program dan Evaluasi |
| 9 | Pengelolaan data indikator | Kepala Seksi Program dan Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan |
| 10 | Waktu pelaksanaan Pengumpulan Data Indikator | 1 Januari - 7 Desember |
| 11 | Jadwal pelaporan | Bulanan |
| 12 | Sumber pengumpulan Data | Data primer dari wilayah kerja BBVet Wates |
| 13 | Hambatan Pengumpulan Data | KIT pengujian, reagen, keterlambatan pelaporan dari Penanggung Jawab kegiatan |

Indikator 2.

| INFORMASI INDIKATOR KINERJA | | STANDAR BAKU PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA |
|-----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | Nama indikator | Dikeluarkannya rekomendasi hasil uji laboratorium sejumlah 650 rekomendasi/tahun |
| 2 | Tujuan/Kepentingan | Untuk tindak lanjut kegiatan penanggulangan dan pengendalian penyakit hewan menular strategis dan zoonosis untuk kepentingan <i>stakeholders</i> |
| 3 | Metode Penghitungan | Diskripsi per tahun sebelumnya |
| 4 | Tipe Penghitungan | Kumulatif per tahun sebelumnya |
| 5 | Indikator Baru | Indikator lama yang tidak berubah sasaran kerjanya |
| 6 | Kinerja Yang Diharapkan | Tindak lanjut <i>stakeholder</i> sesuai dengan rekomendasi |

| | | |
|----|--|--|
| 7 | Standar Indikator | Diterimanya rekomendasi oleh <i>stakeholder</i> |
| 8 | Penanggungjawaban Indikator | Kepala Bidang Pelayanan Veteriner |
| 9 | Pengelola data indikator | Manajer Teknis dan Kepala Seksi Pelayanan Teknik |
| 10 | Waktu pelaksanaan Pengumpulan Data Indikator | 1 Januari - 7 Desember |
| 11 | Jadwal pelaporan | Bulanan |
| 12 | Sumber pengumpulan data | Masing-masing Laboratorium pengujian lingkup BBVet Wates |
| 13 | Hambatan Pengumpulan Data | Ketersediaan sarana prasarana pengujian yang menggunakan KIT impor |

Indikator 3.

| INFORMASI INDIKATOR KINERJA | | STANDAR BAKU PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA |
|------------------------------------|--|---|
| 1 | Nama indikator | Penurunan jumlah hasil uji yang positif dibandingkan dengan jumlah sampel yang diuji |
| 2 | Tujuan/Kepentingan | Untuk mengetahui keberhasilan penanggulangan dan pengendalian kejadian penyakit hewan menular strategis dan zoonosis |
| 3 | Metode Penghitungan | Prosentase jumlah positif dengan jumlah sampel yang diuji |
| 4 | Tipe Penghitungan | Non kumulatif |
| 5 | Indikator Baru | Indikator lama yang berubah sasaran kinerjanya |
| 6 | Kinerja Yang Diharapkan | Penurunan jumlah hasil uji positif untuk pembebasan wilayah bebas dari penyakit hewan menular strategis dan zoonosis |
| 7 | Standar Indikator | Diterimanya penurunan jumlah hasil uji yang positif penyakit hewan menular strategis dan zoonosis oleh <i>stakeholder</i> |
| 8 | Penanggungjawaban Indikator | Kepala Bidang Pelayanan Veteriner |
| 9 | Pengelolaan data indikator | Manajer Teknis dan Kepala Seksi Pelayanan Teknik |
| 10 | Waktu pelaksanaan Pengumpulan Data Indikator | 1 Januari - 7 Desember |
| 11 | Jadwal pelaporan | Bulanan |
| 12 | Sumber pengumpulan Data | Masing-masing Laboratorium pengujian lingkup BBVet Wates |
| 13 | Hambatan Pengumpulan Data | Ketersediaan sarana prasarana pengujian yang menggunakan KIT impor |

Indikator 4.

| INFORMASI INDIKATOR KINERJA | | STANDAR BAKU PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA |
|-----------------------------|--|---|
| 1 | Nama indikator | Tidak ada laporan kejadian penyakit baru eksotik dan/atau yang bersifat luar biasa yang masuk dari wilayah kerja BBVet Wates |
| 2 | Tujuan/Kepentingan | Untuk kepentingan penyidikan dan investigasi kejadian penyakit hewan menular strategis dan zoonosis di wilayah kerja BBVet Wates |
| 3 | Metode Penghitungan | Jumlah laporan yang masuk dari <i>stakeholders</i> |
| 4 | Tipe Penghitungan | Non kumulatif |
| 5 | Indikator Baru | Indikator baru yang berubah sasaran kinerjanya |
| 6 | Kinerja Yang Diharapkan | Keberhasilan penanggulangan dan pengendalian kejadian penyakit baru eksotik dan/atau yang bersifat luar biasa yang masuk dari wilayah kerja BBVet Wates |
| 7 | Standar Indikator | Penerimaan hasil penyidikan oleh <i>stakeholder</i> |
| 8 | Penanggungjawaban Indikator | Kepala Bidang Pelayanan Veteriner |
| 9 | Pengelolaan data indikator | Manajer Teknis Laboratorium Epidemiologi dan Kepala Seksi Informasi Veteriner |
| 10 | Waktu pelaksanaan Pengumpulan Data Indikator | 1 Januari - 7 Desember |
| 11 | Jadwal pelaporan | Insidentil |
| 12 | Sumber pengumpulan Data | Laboratorium Epidemiologi |
| 13 | Hambatan Pengumpulan Data | Keterlambatan komunikasi dan pelaporan oleh <i>stakeholders</i> |

Penyusunan Arsitektur dan Informasi Kinerja yang telah dibuat Peraturan Kementerian Pertanian diminta sebagai acuan bagi masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian dalam menyusun rencana kerja, rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja serta audit kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2015- 2019.

VII. CATATAN EVALUASI DAN PERISTIWA PENTING BBVET WATES KURUN WAKTU 2010-2016

Kinerja penting BBVet Wates kurun waktu 2010-2014 menyangkut kegiatan utama dan kegiatan operasional lapangan yang dapat dianggap sebagai prestasi penting adalah sebagai berikut:

7.1. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner: *Penggunaan HPLC, Deteksi Pemalsuan Produk, Logam Berat, Hormon dan Antibiotik*

BBVET Wates memiliki fasilitas laboratorium KESMAVET yaitu pengujian residu antibiotika kualitatif dan kuantitatif menggunakan *High Performance Liquid Cualitative (HPLC)*, *Gas Chromatography*, pengujian daging bagkai dan pemalsuan daging, pengujian formalin pada makanan, pemeriksaan cemaran mikroba terhadap *Salmonella* dan *Campylobacter* dan pengujian logam berat dengan *Atomic Adsorbance Spectrophotometri (AAS)*.

7.2. Bidang Patologi, Patologi klinik dan Forensik: *Penggunaan Spektrofotometer Dan Protein Plasma Untuk Mengetahui Fungsi Hati serta Blood Analyzer*

Pada laboratorium patologi, Patologi klinik dan forensik dapat mengidentifikasi penyakit dengan makro dan mikroskopis serta dengan imunohistochemistry. Selain itu dapat diketahui fungsi hati yang dinilai dari SGOT dan SGPT dengan menggunakan spektrofotometer dan protein plasma dengan photoplasma dan refractometer serta analisis darah dengan menggunakan *Blood Analyzer*

7.3. Bidang Virologi-Serologi: *Pengembangan Biologi Molekuler, RT-PCR dan Uji Cepat*

Pada laboratorium Virologi isolasi virus pada telur ayam bertunas dan kultur jaringan, uji Fluorescent antibodi teknik, dikembangkannya biologi molekuler (PCR) serta pengembangan RT-PCR untuk uji cepat dan akurat. Pada laboratorium Serologi telah dilakukan Elisa terhadap berbagai penyakit, uji AGID terhadap EBL, Aglutinasi cepat terhadap CRD dan Pullorum serta dikembangkan pula serum neutralisation Test pada penyakit-penyakit hewan.

7.4. Bidang Parasitologi: *Deteksi Antibodi Toxoplasma gondii dengan CAT, Kultur Cacing Nematoda, Diagnosa Parasit Lebah dan Pemeriksaan Sedimentasi dan Kultur Trichomonas*

Pada laboratorium Parasitologi telah dapat dideteksi antibodi *Toxoplasma gondii* dengan Card Agglutination Test (CAT). Kultur cacing Nematoda telah dilakukan dan identifikasi Parasit lebah. Pemeriksaan sedimentasi, kultur terhadap *Trichomonas*, pemeriksaan parasit darah dengan Hematokrit, pewarnaan, uji biologis dan Elisa Parasiter.

7.5. Bidang Bakteriologi: *Isolasi dan Identifikasi Bacillus anthracis, Uji Sensitifitas Antibiotika, Dan Pewarnaan Tahan Asam*

Laboratorium Bakteriologi berhasil mengisolasi dan mengidentifikasi *Bacillus anthracis* pada tanah, kerokan kulit, darah dan material lain yang diduga tercemar. Uji Sensitivitas antibiotika, isolasi dan identifikasi *Campylobacter*, *Salmonella sp.*, *Brucella sp.* dan *Pasteurella sp.*, selain itu juga *Erysipellas sp.*,

Mycoplasma sp., *Haemophilus* dan pewarnaan tahan asam terhadap *Mycobacterium tuberculosis* dan *Mycobacterium paratuberculosis*.

7.6. Bidang Biologi Molekuler: *Laboratorium BSL 3 Mobile*

Laboratorium Biologi molekuler telah mengaplikasikan teknologi PCR konvensional untuk konfirmasi diagnosis serta dikembangkan untuk penyakit-penyakit lainnya. Cara konvensional dikembangkan Real Time PCR untuk Avian Influenza. Sebagai fasilitas utama laboratorium di BBVET Wates adalah laboratorium Zoonosis BSL2 plus yang dapat digunakan untuk mendiagnosis dan mengembangkan uji terhadap berbagai penyakit yang tergolong zoonosis utama. Fasilitas utama ini didukung oleh fasilitas laboratorium pendukung yaitu kendaraan operasional BSL 3 Mobile untuk sampling dan pengujian (PCR).

7.7. Bidang Kerjasama Internasional: *Perluasan Kerjasama Internasional*

Kerjasama internasional BBVET Wates berjalan dengan berbagai lembaga Internasional yang bersifat Bilateral, Multilateral dan Regional antara lain dengan FAO, USAID dan AUSAID, ILRI, JICA, OFFLU, AAHL-Geelong, The University of Queensland, The Institute of Wageningen Internationale.

7.8. Bidang Peningkatan Kompetensi Laboratorium:

Balai Besar Veteriner Wates telah terakreditasi SNI-ISU/IEC 17025: 2008 sejak Tgl. 18 Juli 2012 dan berakhir tanggal 19 Juli 2016, dengan ruang lingkup uji sebanyak 48 ruang lingkup. Pada tahun 2016 status akreditasi telah diperpanjang sampai 20 Juli 2020.

VIII. KEBUTUHAN SUMBER DAYA DAN DANA

Dalam kurun waktu 2015-2019 untuk menjalankan segala program dan kegiatan yang telah disusun, maka BBVet Wates memerlukan sumber daya manusia untuk menjalankannya. Selain sumber daya manusia diperlukan pula dana untuk kegiatan-kegiatan operasional sehari-hari dan kebutuhan dana untuk meningkatkan sumber daya manusia, misalnya melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan (*continuing education*), sehingga BBVet Wates dapat mampu berperan sebagai laboratorium regional yang bersifat rujukan dan pengembangan.

8.1. Kebutuhan SDM

Untuk sumber daya manusia yang dimiliki oleh BBVet Wates, sesuai dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah mengatur tenaga administrasi maupun tenaga fungsional Medik dan Paramedik Veteriner pada berbagai bidang keahlian, yaitu Parasitologi, Bakteriologi, Virologi, Patologi serta Epidemiologi memerlukan tambahan keahlian dan pengetahuan yang berkembang terus sehingga dapat diprogramkan pelatihan dan pendidikan secara berkelanjutan. Demikian juga untuk tenaga non veteriner memerlukan tambahan pengetahuan khususnya dalam bidang manajemen laboratorium. Sambil menunggu standar teknis kebutuhan SDM, sarana prasarana dan dana untuk eselon II BBVet Wates, maka telah dirancang kebutuhan SDM, sarana prasarana dan dana yang kedepan mungkin dapat dijadikan rujukan dalam mengembangkan laboratorium veteriner sejenis di Indonesia.

Sumber daya manusia yang ada saat ini dan kebutuhannya disajikan pada tabel 4, sebagaimana terlampir. (Lampiran 2)

Dari tabel 4 tersebut nampak Balai Besar Veteriner Wates saat ini mempunyai tenaga sumber daya manusia sebanyak 90 orang pegawai terdiri dari 34 orang Dokter Hewan (Medik Veteriner), 24 orang paramedik veteriner dengan berbagai keahlian dan pada tahun 2014 ditargetkan tambahan tenaga veteriner (Medik, paramedik dan tenaga administrasi) tersebut menjadi 125 orang tenaga teknis dan administrasi. Dari tabel tersebut nampak bahwa kebutuhan paling mendesak saat ini yaitu tenaga administrasi dan paramedik sedangkan yang paling sedikit yaitu tenaga dibidang adminstrasi. Untuk Balai Besar Veteriner dalam menjalankan tugas dan fungsinya diperlukan standar SDM yaitu adanya tenaga Dokter Hewan yang berkualifikasi sampai jenjang S3 pada setiap laboratorium secara berkelanjutan.

Sedangkan untuk kebutuhan pendidikan dan pelatihan SDM sampai tahun 2019 disajikan pada tabel 5. berikut ini.

Tabel: 5 Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan SDM (orang)

| SDM | Dik | Latihan | | Tahun | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------------|------|-------|-----|------|--------|-------|--------|-------|--------|------|--------|
| | | Teknik. Lab | Umum | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| | | | | Dik | Lat | Dik | Lat | Dik | Lat | Dik | Lat | Dik | Lat |
| Epidemiologi | 2 | 4 | 1 | - | 4 | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Bakteriologi | 1 | 6 | | - | 6 | - | 3(M+P) | - | 3(M+P) | 1 | 3(M+P) | 1 | 3(M+P) |
| Virologi | 2 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 2(M+P) | 1(s2) | 2(M+P) | 1(S3) | 2(M+P) | 1 | 2(M+P) |
| Parasitologi | 2 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 |
| Bioteknologi | 2 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kesmavet | 2 | 4 | | 2 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 |
| Patologi | 1 | 2 | | 1 | 6 | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
| Serologi | 1 | 2 | | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 2 |
| Pato-klinik | 1 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 |

Catatan: - Pendidikan (Dik) adalah untuk mencapai gelar yang lebih tinggi
 - Pelatihan (Lat) adalah untuk meningkatkan keterampilan termasuk kursus penjenjangan
 - Umum adalah latihan untuk bidang-bidang non teknik laboratorium, misalnya: perencanaan, hukum, lingkungan, listrik, mesin, dan informasi
 - M + P = Medik dan Paramedik

Dari tabel 5 tersebut nampak bahwa untuk pendidikan dibutuhkan 14 orang menempuh pendidikan lanjutan dan untuk pelatihan sebanyak 26 orang diharapkan mengikuti pelatihan pada berbagai bidang keilmuan.

8.2. Kebutuhan Dana dan Anggaran

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi BBVet Wates sebagai Balai Besar Veteriner, maka kebutuhan SDM tersebut dirasakan sangat mendesak. Selain itu diperlukan sejumlah dana untuk menjalankan seluruh kegiatan operasional yang telah ditetapkan, termasuk kebutuhan peralatan dan mesin, belanja barang dan jasa, gaji dan upah, belanja barang non operasional lainnya, belanja perjalanan dinas dan berbagai kebutuhan lainnya. Biaya yang dibutuhkan dalam kurun waktu 2015-2019 disampaikan pada tabel 6. Kebutuhan biaya tersebut hanya untuk membiayai kegiatan regular BBVet Wates sehingga kebutuhan tambahan untuk kegiatan dalam rangka memenuhi standar sebagai Balai Besar terutama untuk standar kebutuhan tenaga Medik dan Paramedik dan kebutuhan dana pendidikan Sumber Daya Manusia masih memerlukan tambahan dana. Dana tersebut akan diupayakan melalui dana khusus yaitu Proyek bantuan kerjasama luar negeri, program khusus peningkatan Sumber Daya Manusia dan program lainnya yang tidak mengikat. Selain itu terus akan diupayakan tambahan dana untuk pengadaan sarana prasarana laboratorium sehingga menjadikan BBVet Wates menjadi laboratorium rujukan baik di tingkat Nasional maupun Regional.

Adapun kebutuhan dana untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk BBVet Wates disajikan pada tabel 6, sebagaimana terlampir. (Lampiran 3) Untuk program identifikasi kegiatan butir 1 sampai 5 tertera kebutuhan anggaran secara kumulatif, karena mencakup kebutuhan bahan reagensia

yang diperlukan secara keseluruhan. Untuk kegiatan butir 7 baru akan dimulai tahun 2015.

Dari tabel 6 tersebut nampak bahwa kebutuhan terbesar diperlukan untuk kegiatan identifikasi (pemeriksaan dan pengujian), kemudian diikuti oleh kegiatan pengamatan (penyidikan, surveilans, survei dan monitoring). Hal ini merupakan tugas pokok dan fungsi BBVet Wates.

8.3. Kebutuhan Sarana Prasarana

Keadaan sarana prasarana dan kebutuhan untuk Balai Besar Veteriner Wates disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel: 6. Kebutuhan alat dan sarana

| Peralatan dan Sarana | Yang sudah ada | Standar | Kebutuhan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|----------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------|------|------|------|------|------|---|
| Epidemiologi | 3 | 5 | Komputer Desk top | 1 | 1 | - | - | - | |
| | | | Thermometer digital | 2 | | | | | |
| | 3 | 4 | Printer | 1 | 1 | | | | |
| Bakteriologi | 2 | | Mikroskop | - | 1 | | | | |
| | 1 | | Ph meter | 2 | | | | | |
| | | | Mikroskop Olympus BX51 | | 1 | | | | |
| | 1 | | Timbangan digital 2 digit | 1 | | | | | |
| | 3 | | Kulkas 1 pintu | 1 | | | | | |
| | 1 | | Anaerobic jar | | 2 | | | | |
| | | | Mixing Block MB 102 | | | 1 | | | |
| | | | Wastafel | | | | 1 | | |
| | | | Meja stainless kecil 40 x 40 cm | | | 1 | | | |
| | | | Dehumidifier | | | | | 1 | |
| | | | Pipet multichannel 12 (5-50 µl) | | | | | | 1 |
| | | | Pipet multichannel 12 (50-300 µl) | | | | | | 1 |
| | | | Thermometer digital | 2 | | | | | |
| | | Bahan & alat habis pakai | | | | | | | |
| | | Autoclave | 1 | | | | | | |
| Virologi-Serologi | 2 | | Elisa Reader | | 1 | | | | |
| | 1 | | Elisa Washer | | 1 | | | | |
| | 1 | | Ultrasonic cleaner | | 1 | | | | |
| | - | | Portable sentrifuge | | | 2 | | | |
| | 1 | | Biosafety Cabinet Class II | 1 | 1 | | 1 | | |
| | | | Setrifuse untuk membuat kering beku | | | 1 | | | |
| | - | | Deep freezer -80°C | | | | | 1 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|--|--|---|-----|---|---|---|
| | - | | Mikroplate washer | | | | | 1 |
| | 2 | | Thermometer digital | 2 | | | | |
| | | | Bahan & alat habis pakai | | | | | |
| Parasitologi | 1 | | Elisa reader | | | | 1 | |
| | 2 | | Mikroskop Olympus Bx 51 | | 1 | | | |
| | 1 | | Autoclave | | | 1 | | |
| | 2 | | Thermometer digital | 3 | | | | |
| | - | | Whitlock | | 10 | | | |
| | - | | Petridish bergaris | | 100 | | | |
| | - | | Biosafety Cabinet Class II | | | | 1 | |
| | 2 | | Stereo mikroskop | | 1 | | 1 | |
| | | | Bahan & alat habis pakai | | | | | |
| Bioteknologi | | | DNA- Squencer | | | | | 1 |
| | | | Horizontalelektroforesis | | 1 | | | |
| | | | Mesin Thermal cycler | | | 1 | | |
| | | | Deep Freezer -80°C | | | 1 | | |
| | | | Pipet 1-10 µl, 2-20µl, 20-200 µl, 100-1000 µl, | | 1 | | | |
| | | | Thermometer digital | 2 | | | | |
| | | | Bahan & alat habis pakai | | | | | |
| Kesmasvet | | | Alat pencuci alat gelas | 1 | | | | |
| | | | Vortex 0-2.500 rpm | 1 | | | | |
| | | | Biological Savety Cabinet class II | 1 | | | | |
| | | | Kulkas | 1 | | | | |
| | | | Almari alat kaca | | 1 | | | |
| | | | Bunsen | | 1 | | | |
| | | | Autoclave 105 – 135 0C, capacity 53 liter | 1 | | | | |
| | | | Neraca analitic | | | 1 | | |
| | | | Pipet tetes | | | 1 | | |
| | | | Almari arsip | | | | 1 | |
| | | | Bahan & alat habis pakai | | | | | |
| | | | Freezer | 1 | | | | |
| | | | Thermometer digital | 1 | | | | |
| Patologi | | | Tissue Processor | | 1 | | | |
| | | | Water bath | | | | 1 | |
| | | | Embeding | | | | | 1 |
| | | | Drying Slide | | | 1 | | |
| | | | Printer | | | | 1 | |
| | | | Rak kayu | 1 | | | | |
| | | | Thermometer digital | 2 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | Bahan & alat habis pakai | | | | | |
| Patologi Klinik | | | Mikroskop | | 1 | | | |
| | | | Vortex Mixer | | | 1 | | |
| | | | Thermometer digital | 2 | | | | |
| | | | Manual Titration | | | 1 | | |
| | | | Moisture balance + printer | | | | 1 | |
| | | | Digital Refractometer | | | | 1 | |
| | | | Distillation unit | | | | 1 | |
| | | | Laboratory counter | | | | | 1 |
| | | | Thin Layer Chromatography | | | | | 1 |
| | | | Sentrifuge-hematocrit | | | 1 | | |
| | | Bahan & alat habis pakai | | | | | | |
| IKHP (Instalasi Kandang Hewan Percobaan) | | | Hepa Filter | 1 | | | | |
| | | | Dipping pada pintu gerbang | 1 | | | | |
| | | | Pengerasan jalan antara kandang dan kantor | 1 | | | | |
| | | | Pengerasan jalan antar kandang | | | | | |
| | | | Pembuatan tempat pembuangan limbah (padat dan cair dari hewan percobaan di IKHP) | | 1 | | | |
| | | | Lahan Hijauan Makanan Ternak | 1 | | | | |
| | | | Penyediaan tandon air besar untuk kebutuhan Lahan HMT dan air minum yang higienis | | | 1 | | |
| | | | Kandang ayam baterai | 1 | | | | |
| | | | Aesories pompa air | 1 | | | | |
| | | | Timbangan | 1 | | | | |

8.4. Kebutuhan Tenaga Pendukung

Tenaga pendukung meliputi tenaga-tenaga perencana, ahli hukum, ahli lingkungan hidup dan ahli informasi dan komunikasi. Kebutuhan tenaga pendukung disajikan pada Tabel 8 berikut ini:

Tabel: 7. Kebutuhan tenaga pendukung (*supporting*) Laboratorium

| SDM | Saat ini | | Standar | | Kebutuhan | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|------------------|----------|----|---------|----|-----------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | S1 | S0 | S1 | S0 | S1 | S0 | S1 | S0 | S1 | S0 | S1 | S0 | S1 | S0 | S1 | S0 |
| Ahli Perencanaan | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ahli Teknik | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Ahli Hukum | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUMLAH | 0 | 0 | 7 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 |

Catatan: - S0 adalah tenaga menengah
- Ahli teknik terdiri atas teknik informasi, listrik, mesin dan lingkungan

IX. PENUTUP

Demikian pokok-pokok Rencana Strategis BBvet Wates telah disusun sebagai persyaratan untuk menjalankan kegiatan selama kurun waktu 2015-2019. Di dalam pokok-pokok Rencana Strategis tersebut telah diuraikan latar belakang tentang posisi BBvet Wates dalam sistem Kesehatan Hewan Nasional dalam perannya untuk pengamatan penyakit, penyidikan, surveilans dan pengamanan.

Dalam menjalankan peran dan fungsinya telah dirumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, serta kebijakan dan langkah-langkah strategis. Bertitik tolak dari perumusan tersebut maka telah disusun berbagai program kerja dan indikatornya dalam bentuk Arsitektur dan Informasi Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 92/Permentan-OT.140/12/2011.

Rencana Strategis ini tentunya masih banyak memerlukan masukan dan saran ataupun kritik dari berbagai pihak yang peduli terhadap pengembangan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner serta pembangunan peternakan pada umumnya. Untuk ini BBvet Wates membuka diri untuk menerima berbagai masukan, saran serta kritik yang membangun.

Lampiran : 1. Arsitektur Kinerja Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta Periode 2015 - 2019

| PROGRAM | KEGIATAN SESUAI TUGAS & FUNGSI | OUTCAME | OUTPUT | TARGET TAHUNAN | | | | | |
|--|---|--|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | TARGET 2015 s/d 2019 (SATUAN) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. Pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa | Pelaksanaan Pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa : | | | | | | | | |
| | a. Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | 1. Peningkatan pelayanan kesehatan hewan dan kesmavet 2. Kepuasan customer | 1. Status daerah terpantau | 390 kab/kota | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| | b. Penyidikan penyakit hewan dan Pelayanan teknis penyidikan | 1. Terkendalinya penyakit PHMS 2. Peningkatan pelayanan teknis penyidikan | 1. Pola Penyakit dan status wilayah 2. Jumlah sampel penyidikan 3. Jumlah laporan dinas untuk penyidikan 4. Jumlah teknik dan metode penyidikan | 100 paket penyidikan 1.530 Sampel 100 Laporan 34 jenis | 20 300 20 6 | 20 300 20 6 | 20 305 20 7 | 20 310 20 7 | 20 315 20 8 |
| | c. Surveillance, Monitoring, dan investigasi penyakit hewan dan produk hewan | 1. Terkendalinya penyakit PHMS 2. Tersedianya produk hewan yang ASUH | 1. Prevalensi dan kondisi penyakit hewan 2. Keamanan produk hewan | 119 Kegiatan 23 Kegiatan | 23 4 | 23 4 | 24 5 | 24 5 | 25 5 |
| | d. Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa. | 1. Tersedianya data pengamatan yang akurat 2. Adanya data diagnosa penyakit hewan | 1. Terdiagnosanya penyakit hewan | 14.000 Diagnosa | 2.400 | 2.600 | 2.800 | 3.000 | 3.200 |
| e. Pemeriksaan kesehatan | 1. Terkendalinya | Status Keswan UPT Perbibitan | 55 paket | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | hewan,semen,dan embrio, | penyakit yang menjadi prasarat ternak bibit 2. Tersedianya ternak bibit yang sehat. | dan wilayah sumber bibit | pemeriksaan | | | | | |
| | f. Pemetaan Regional Penyakit Hewan | Adanya peta penyakit hewan di wilayah kerja | Peta Penyakit | 15 Peta | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | g. Pelaksanaan Analisa risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan | 1. Terkendalinya penyebaran penyakit hewan | 1. Terukurnya resiko penyebaran penyakit hewan dan keamanan produk hewan dari penyakit zoonosis | 9 Kegiatan | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. Pengujian Veteriner dan Produk Hewan | Pelaksanaan Pengujian Veteriner Dan Produk Hewan : a. Pengujian veteriner , pemberian laporan dan sertifikasi hasil uji. | 1. Peningkatan pelayanan pengujian veteriner 2. Adanya laporan/ sertifikat hasil uji ditindak lanjuti oleh Dinas terkait. | 1. Jumlah sampel aktif 2. Jumlah sampel pasif 3. Jumlah Hasil Uji 4. Jumlah Sertifikat hasil Uji | 137.909 Sampel 77.500 Sampel 354.500 Hasil uji 7.000 Sertifikat hasil Uji | 27.309 15.000 85.000 10 | 27.400 15.300 85.250 12 | 27.500 15.500 8.500 13 | 27.700 15.700 85.750 14 | 28.000 16.000 90.000 15 |
| | b. Pemeriksaan dan pengujian produk hewan | 1. Peningkatan pelayanan pengujian veteriner 2. Adanya laporan/ sertifikat hasil uji untuk ditindak lanjuti oleh Dinas terkait. | 1. Jumlah Sampel aktif 2. Jumlah sampel pasif 3. Hasil Uji 4. Lembar Hasil Uji (Sertifikat) | 9.700 Sampel 3.500 Sampel 22.500 Hasil Uji 1.325 Sertifikat hasil uji | 1.900 650 4.000 12 | 1.900 675 4.250 12 | 1.950 700 4.500 13 | 1.950 725 4.750 14 | 2.000 750 5.000 15 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 3. Pengujian Toksikologi veteriner dan Keamanan Pakan | 1. Peningkatan pelayanan pengujian Toksikologi veteriner dan keamanan pakan 2. Diketuahuinya penyebab keracunan/kematian ternak 3. Terjaminnya keamanan pakan | Hasil Uji Toksikologi dan keamanan pakan | 4.610 Hasil uji | 900 | 920 | 925 | 930 | 935 |
| | 4. Pengujian forensik Veteriner | 1. Peningkatan pelayanan pengujian forensik veteriner | Hasil uji pengujian forensik veteriner | 102 Hasil uji | 15 | 18 | 21 | 23 | 25 |
| 3. Pengembangan Teknik dan Metode | Pelaksanaan Pengembangan Teknik dan Metode : a. Pelayanan teknis penyidikan , pengujian veteriner & produk hewan serta pengembangan teknik & metode penyidikan ,diagnose dan pengujian veteriner | 1. Terkendalinya penyakit PHMS 2. pelayanan teknis penyidikan 3. Berkembangnya metode pengujian baru laboratorium 4. Berkembangnya teknik & metoda penyidikan baru | 1. Metoda pengujian baru laboratorial 2. Teknik & metoda penyidikan baru | 15 Metoda 10 Metoda | 3 2 | 3 2 | 3 2 | 3 2 | 3 2 |
| | b. Kajian terbatas teknik veteriner | Berkembangnya kajian terbatas teknik veteriner | Adanya kegiatan kajian terbatas teknik veteriner | 14 Kegiatan | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | c. Pengkajian batas maksimum residu obat hewan dan cemaran mikroba | Adanya jaminan keamanan produk hewan terhadap residu obat | Terkajinya batas maksimum residu obat hewan dan cemaran mikroba | 5 Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | d. Pengembangan & diseminasi teknik dan metoda penyidikan, Diagnosa, & Pengujian Veteriner | 1. Terpublikasikannya pengembangan Teknik dan Metode penyidikan dan pengujian veteriner 2. Terpublikasikannya pengembangan Teknik dan Metode penyidikan dan pengujian veteriner | Buletin, Manual/Buku Petunjuk/SOP, Leaflet. | 20 edisi 130 jenis 124 jenis 23 Jenis | 4 26 20 4 | 4 26 22 4 | 4 26 25 5 | 4 26 27 5 | 4 26 30 5 |
| 4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat | Pelaksanaan Peningkatan partisipasi masyarakat : a. Peningkatan Kesadaran masyarakat (Public awareness) | 1. Meningkatnya kesadaran masyarakat | 1. Kegiatan sosialisasi | 15 Kegiatan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2. Meningkatnya partisipasi masyarakat | | | | | | | |
| | b. Pelayanan Laboratorium Rujukan dan acuan diagnosa penyakit hewan menular | 1. Meningkatnya pelayanan laboratorium rujukan 2. Sebagai acuan diagnosa penyakit hewan menular | 1. Jumlah sampel yang dirujuk 2. Pelaksanaan Uji Profisiensi dan uji banding 3. Pelatihan/magang | 39 sampel 34 Laboratorium 326 Peserta | 7 6 60 | 8 6 63 | 8 7 65 | 8 7 68 | 8 8 70 |
| | c. Pengembangan sistem dan diseminasi informasi veteriner | 1. Kemudahan masyarakat mengakses informasi balai 2. Kemudahan dalam mengakses data pengujian | 1. Peningkatan Web side 2. Pengembangan info lab 3. Perpustakaan Online | 5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 |
| | 3. Pemberian bimbingan teknis laboratorium veteriner, Kesejahteraan hewan, dan teknis penanggulangan penyakit hewan | Peningkatan kompetensi Lab B dan Lab C, | Kegiatan bimbingan Teknis | 1. 30 Lab B 2. 32 Lab C | 6 6 | 6 6 | 6 6 | 6 7 | 6 7 |
| | d. Diseminasi Teknik dan Metode penyidikan dan pengujian veteriner | 1. Terpublikasinya hasil penyidikan, dan pengujian veteriner 2. Terpublikasinya pengembangan Teknik dan Metode penyidikan dan pengujian veteriner | Buletin, Manual/Buku Petunjuk/SOP, Leaflet. | 20 edisi 130 jenis 124 jenis 23 Jenis | 4 26 20 4 | 4 26 22 4 | 4 26 25 5 | 4 26 27 5 | 4 26 30 5 |
| | e. Pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian veteriner, Saran Teknis Penanggulangan | 1. Penanganan penyakit hewan 2. Penanggulangan penyakit PHMS | 1. Rekomendasi hasil pemeriksaan & pengujian veteriner 2. Saran Teknis Penanggulangan | 3.300 Rekomendasi 110 saran teknis penanggulangan | 650 20 | 655 21 | 660 22 | 665 23 | 670 24 |
| | f. Penyusunan Program, rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan kerjasama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan | 1. Terarahnya kegiatan balai sesuai dengan RKT, Renstra & Master plan 2. Adanya dukungan anggaran untuk pelaksanaan | 1. Tersusunnya program kegiatan (RKT, Renstra, Master plan) 2. Tersusunnya rencana anggaran 3. Tersusunnya kerjasama | 13 Laporan 5 Laporan 15 Laporan | 2 1 3 | 2 1 3 | 3 1 3 | 3 1 3 | 3 1 3 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|------------|----|-------|------|-------|----|
| | | kegiatan 3. Adanya aturan yang jelas dalam pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait 4. Terevaluasi dan terlaporkannya kegiatan balai. | dengan instansi terkait 4. Penyiapan evaluasi dan pelaporan | 10 Laporan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | g. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga | 1. Termenejemennya tata usaha dan rumah tangga balai 2. Terkelolanya dukungan manajemen dan teknis lainnya 3. Peningkatan pelayanan pada customer | Indeks Kepuasan Masyarakat | Nilai | 77 | 77,25 | 77,5 | 77,75 | 78 |

Lampiran 2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

| SDM | Saat ini | | | Standar | | | Kebutuhan | | | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | | | | | | | | | |
|------------------|----------|----|----|---------|-----|----|-----------|---|-----|-------|----|---|-------|----|----|-------|-----|----|-------|---|-----|-------|----|---|-----|----|----|---|---|---|---|---|
| | Medik | | Pm | Medik | | Pm | Medik | | P | Medik | | P | Medik | | P | Medik | | P | Medik | | P | Medik | | P | | | | | | | | |
| | Drh | S2 | S3 | | drh | S2 | S3 | | Drh | S2 | S3 | | Drh | S2 | S3 | | Drh | S2 | S3 | | drh | S2 | S3 | | drh | S2 | S3 | | | | | |
| Epidemiologi | 6 | 5 | | 3 | | 4 | | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | |
| Bakteriologi | 5 | 3 | - | 3 | 2 | 2 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| Virologi | 3 | 1 | | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | | |
| Parasitologi | 3 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - |
| Bioteknologi | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| Kesmavet | 5 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Patologi | 4 | 3 | 1 | 3 | | 4 | | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| Serologi | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| Pato-klinik | 3 | 1 | | 1 | | 2 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |
| Ahli Perencanaan | 2 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Ahli Teknik | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Ahli Hukum | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |

Lampiran 3. Tugas Pokok dan Fungsi, Kegiatan, Lokasi, Indikator dan Kebutuhan Dana

| TUPOKSI | PROGRAM | KEGIATAN | LOKASI (Provinsi) | TARGET / SASARAN | | | | | INDIKATOR | ALOKASI ANGGARAN (juta) | | | | | |
|--|---|---|------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------------|----------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 2015 KAB | 2016 KAB | 2017 KAB | 2018 KAB | 2019 KAB | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Pengamatan, Identifikasi (pemeriksaan dan pengujian) serta pelaporan | PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN DIAGNOSA | Pelaksanaan Pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa : | Jawa Tengah DIY Jawa Timur | | | | | | 65 Kab/Kota | | | | | | |
| | | h. Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | | 5.234 | 5.400 | 5.600 | 5.850 | 6.000 | |
| | | i. Penyidikan penyakit hewan | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 17 Kab/Kota | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 |
| | | j. Surveillance, Monitoring, dan investigasi penyakit hewan dan produk hewan | | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | | 65 Kab/Kota | 1.782 | 1.783 | 1.784 | 1.785 | 1.786 |
| | | k. Pemeriksaan kesehatan hewan,semen,dan embrio, | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | 9 Kab/Kota | 1.065 | 1.067 | 1.070 | 1.073 | 1.075 |
| | | l. Pemetaan Regional Penyakit Hewan | | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | | 78 Kab/Kota | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| | | m. Pelaksanaan Analisa risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 6 Kab/Kota | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 |
| | | n. Penyidikan melalui pemeriksaan dan pengujian produk hewan | | 32 | 33 | 35 | 37 | 39 | | 30 Kab/Kota | 100 | 103 | 105 | 110 | 113 |
| | PENGUJIAN VETERINER DAN PRODUK HEWAN | Pelaksanaan Pengujian Veteriner Dan Produk Hewan : | Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur | | | | | | 65 Kab/Kota | | | | | | |
| | | a. Pengujian dan pemberian laporan dan/atau sertifikasi hasil uji. | | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | | 6.962 | 6.965 | 6.970 | 6.975 | 6.980 | |
| | b. Pengujian Toksikologi veteriner dan Keamanan Pakan | Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 15 Kab/Kota | 250 | 253 | 255 | 257 | 260 | | |

Lanjutan

| | PRO GRAM | KEGIATAN | LOKASI (Provinsi) | TARGET / SASARAN | | | | | INDIKA TOR | ALOKASI ANGGARAN (juta) | | | | |
|---------|-------------|---|----------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | | 2015 KAB | 2016 KAB | 2017 KAB | 2018 KAB | 2019 KAB | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| TUPOKSI | | c. Pengujian forensik Veteriner | Jawa Tengah DIY Jawa Timur | 5 | 7 | 10 | 13 | 15 | 5 kab/kot a | 40 | 43 | 45 | 47 | 50 |
| | | d. Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa. | Jawa Tengah DIY Jawa Timur | 70 | 73 | 75 | 77 | 78 | 65 Kab/kot a | 550 | 552 | 555 | 558 | 600 |
| | | Pelaksanaan Pengembangan Teknik dan Metode : | | | | | | | | | | | | |
| | | e. Pengembangan & diseminasi teknik dan metoda penyidikan, Diagnosa, & Pengujian Veteriner | Jawa Tengah DIY Jawa Timur | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 10 Kab/kot a | 116 | 135 | 160 | 185 | 200 |
| | | f. Kajian terbatas teknik veteriner | Jawa Tengah DIY Jawa Timur | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 Kab/kot a | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| | | g. Pengkajian batas maksimum residu obat hewan dan cemaran mikroba | Jawa Tengah DIY Jawa Timur | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 14 Kab/Ko ta | 900 | 905 | 910 | 915 | 920 |
| | | h. Pelayanan teknis penyidikan , pengujian veteriner & produk hewan serta pengembangan teknik & metode penyidikan ,diagnose dan pengujian veteriner | Jawa Tengah DIY Jawa Timur | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 20 Kab/ Kota | 377 | 380 | 383 | 385 | 388 |

Lanjutan

| TUPOKSI | PROGRAM | KEGIATAN | LOKASI (Provinsi) | TARGET / SASARAN | | | | | INDIKATOR | ALOKASI ANGGARAN (juta) | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------|----------|-------------|----------|-------------|-------------------------|-------------|------|------|------|-----|-----|
| | | | | 2015 KAB | 2016 KAB | 2017 KAB | 2018 KAB | 2019 KAB | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 2. Pengamatan/ Identifikasi (pemeriksaan dan pengujian) serta pelaporan | PENINGKATAN PARTISIPASIMASYARAKAT | Pelaksanaan Peningkatan partisipasi masyarakat : | Jawa Tengah DIY Jawa Timur | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 50 Kab/Kota | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | |
| | | h. Peningkatan Kesadaran masyarakat (Public awareness) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | i. Pelayanan Laboratorium Rujukan dan acuan diagnosa penyakit hewan menular | | Jawa Tengah DIY Jawa Timur | 10 | 10 | 12 | 12 | | 12 | 10 kab/Kota | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 |
| | | j. Pengembangan sistem dan diseminasi informasi veteriner | | Jawa Tengah DIY Jawa Timur | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 12 kab/kota | 40 | 43 | 45 | 47 | 50 |
| | | k. Pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian veteriner, Saran Teknis Penanggulangan | | Jawa Tengah DIY Jawa Timur | 20 | 22 | 25 | 28 | | 30 | 20 Kab/Kota | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 |
| | | l. Penyusunan Program, rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan kerjasama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan | | Jawa Tengah DIY Jawa Timur | 78 | 78 | 78 | 78 | | 78 | 70 Kab/Kota | 340 | 343 | 345 | 347 | 350 |
| | | m. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga | | Jawa Tengah DIY Jawa Timur | 78 | 78 | 78 | 78 | | 78 | 70 Kab/Kota | 297 | 300 | 303 | 305 | 307 |
| n. Pemberian bimbingan teknis laboratorium veteriner, Kesejahteraan hewan, dan teknis penanggulangan penyakit hewan | Jawa Tengah DIY Jawa Timur | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 kab/Kota | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | | | | |